

BBM 5**LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN INDONESIA****Pendahuluan**

Pendidikan nasional Indonesia dewasa ini terpaut dengan praktik-praktik pendidikan pada masa lalu, dan sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Terdapat berbagai pengetahuan dan nilai sejarah dalam praktik pendidikan bangsa kita di masa lalu, yang dapat kita ambil hikmahnya demi pembangunan pendidikan di masa sekarang dan di masa depan. Sebab itu, sejarah pendidikan nasional tersebut perlu Anda pelajari.

BBM ini akan membantu Anda untuk memahami pendidikan di Indonesia sejak zaman Purba hingga zaman kolonial Belanda; pendidikan di Indonesia pada zaman pergerakan kebangsaan (pergerakan nasional) dan zaman Pendudukan Militerisme Jepang; serta pendidikan pada zaman kemerdekaan hingga era pembangunan jangka panjang pertama (PJP I). Semua ini tentunya akan memperluas wawasan kependidikan Anda, dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam berpartisipasi membangun pendidikan nasional.

Materi BBM ini terdiri atas tiga sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan pertama mencakup sejarah pendidikan di Indonesia pada zaman Purba, zaman Kerajaan Hindu-Budha, zaman Kerajaan Islam, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol, serta zaman Kolonial Belanda. Sub pokok bahasan kedua mencakup sejarah pendidikan yang diselenggarakan oleh Kaum Pergerakan Kebangsaan (Pergerakan Nasional) dan pemerintah Pendudukan Jepang. Adapun sub pokok bahasan ketiga mencakup sejarah pendidikan pada periode tahun 1945-1969 dan pada era Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I.

Setelah mempelajari BBM ini, Anda diharapkan dapat mendeskripsikan sejarah pendidikan di Indonesia. Demi mencapai tujuan itu, Anda perlu dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Menjelaskan pendidikan pada zaman Purba.
2. Menjelaskan pendidikan pada zaman Kerajaan Hindu-Budha.

3. Menjelaskan pendidikan pada zaman Kerajaan Islam
4. Menjelaskan pendidikan pada zaman pengaruh Portugis dan Spanyol.
5. Menjelaskan pendidikan pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda.
6. Menjelaskan pendidikan Kaum Pergerakan Kebangsaan (Pergerakan Nasional).
7. Menjelaskan pendidikan zaman pendudukan Militerisme Jepang.
8. Menjelaskan pendidikan pada periode tahun 1945-1969.
9. Menjelaskan pendidikan pada era PJP I.

Materi BBM disusun menjadi tiga kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1 : Pendidikan zaman Purba hingga zaman Pemerintahan Kolonial Belanda.

Kegiatan Belajar 2: Pendidikan yang diselenggarakan Kaum Pergerakan Nasional, dan pendidikan pada masa Pendudukan Militerisme Jepang.

Kegiatan Belajar 3: Pendidikan pada periode tahun 1945-1969 dan pada era PJP I.

Petunjuk Belajar

Agar dapat memahami materi BBM ini dengan baik serta mencapai kompetensi yang diharapkan, gunakan strategi belajar berikut ini:

1. Sebelum membaca BBM ini, pelajari terlebih dahulu glosarium pada akhir BBM yang memuat istilah-istilah khusus yang digunakan dalam BBM ini.
2. Baca materi BBM dengan seksama, tambahkan catatan pinggir, berupa tanda tanya, pertanyaan, konsep lain yang relevan, dll. sesuai pemikiran yang muncul.
3. Cermati dan kerjakan latihan yang diberikan. Dalam mengerjakan latihan tersebut, gunakan pengetahuan dan pengalaman Anda sebelumnya.
4. Kerjakan tes formatif seoptimal mungkin, dan gunakan kunci jawaban untuk membuat penilaian sudah atau belum memadainya jawaban Anda.
5. Buat catatan khusus hasil diskusi dalam tutorial tatap muka untuk digunakan dalam pembuatan tugas kuliah dan ujian akhir mata kuliah.

Kegiatan Belajar 1

PENDIDIKAN PADA ZAMAN PURBA HINGGA ZAMAN PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA

Kegiatan belajar ini menyajikan sejarah pendidikan Indonesia pada zaman Purba hingga zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Kajian sejarah pendidikan ini meliputi dua hal pokok, yaitu latar belakang sosial budayanya dan implikasinya terhadap pendidikan. Dengan demikian, melalui kegiatan belajar ini Anda akan dapat menjelaskan kondisi pendidikan di Indonesia pada zaman Purba, zaman kerajaan Hindu/Budha, zaman kerajaan Islam, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol, dan pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda yang turut mewarnai perkembangan pendidikan di Indonesia pada zaman berikutnya hingga dewasa ini.

1. Zaman Purba.

Latar Belakang Sosial Budaya. Setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan, kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman Purba disebut kebudayaan *paleolitik*. Adapun kebudayaan pada kurang lebih 1500 tahun SM yang lalu disebut kebudayaan *neolitik*.

Kebudayaan masyarakat pada zaman purba tergolong kebudayaan maritim. Kepercayaan yang dianut masyarakat antara lain *animisme* dan *dinamisme*. Masyarakat dipimpin oleh ketua adat. Namun demikian ketua adat dan para *empu* (pandai besi dan dukun yang merupakan orang-orang pandai) tidak dipandang sebagai anggota masyarakat lapisan tinggi, kecuali ketika mereka melaksanakan peranannya dalam upacara adat atau upacara ritual, dll. Sebab itu, mereka tidak memiliki *stratifikasi sosial* yang tegas, tata masyarakatnya bersifat egaliter. Adapun karakteristik lainnya yakni bahwa mereka hidup bergotong-royong.

Pendidikan. *Tujuan pendidikan* pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adapt dan terhadap nilai-nilai religi (kepercayaan) yang mereka yakini. Karena kebudayaan masyarakat masih bersahaja, pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal (sekolah).

Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat yang alamiah. *Kurikulum pendidikannya* meliputi pengetahuan, sikap dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang, pendidikan keterampilan mencari nafkah (khususnya bagi anak laki-laki) dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan riil dalam masyarakatnya. *Pendidiknya* terutama adalah para orangtua (ayah dan ibu), dan secara tidak langsung adalah para orang dewasa di dalam masyarakatnya. Sekalipun ada yang belajar kepada empu, apakah kepada pandai besi atau kepada dukun jumlahnya sangat terbatas, utamanya adalah anak-anak mereka sendiri.

2. Zaman Kerajaan Hindu-Budha.

Latar Belakang Sosial Budaya. Nenek moyang kita pada zaman ini umumnya tinggal di daerah subur dekat pesisir pantai. Mereka melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang dari India yang singgah dalam perjalanannya. Hubungan dagang semakin lama semakin meningkat. Seiring dengan itu ke dalam masyarakat kita masuklah kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang India. Antara lain berupa bahasa, tulisan, agama, termasuk juga sistem pemerintahan yang berlaku di India.

Masuknya pengaruh kebudayaan tersebut di atas telah menimbulkan perubahan keadaan sosial-budaya masyarakat setempat. Para ketua adat di negeri kita zaman itu lambat laun berusaha menyamai raja di India. Diantara para ketua adat ada yang dinobatkan atau menobatkan diri menjadi raja-raja lokal. Struktur sosial yang pada awalnya bersifat egaliter (tidak mengenal stratifikasi sosial yang tegas) juga turut berubah. Maka timbullah dua golongan manusia, yaitu: golongan yang dijamin dan golongan yang menjamin. Raja dengan para pegawainya berstatus sebagai yang dijamin, sedangkan rakyat jelata berstatus sebagai yang menjamin. Sebagaimana di India, terdapat stratifikasi sosial berdasarkan kasta, yakni: kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Syudra, dan Paria. Sekalipun stratifikasi sosial semacam itu tidak berlaku secara menyeluruh dan tegas di dalam masyarakat kita (misal: bagi penganut animisme, dinamisme dan Budha yang juga telah ada saat itu), namun batas pemisah kelas sosial antara yang dijamin dan yang menjamin tampak jelas. Menurut para ahli, paling lambat pada abad ke 5 Masehi telah dimulailah zaman sejarah di negeri kita. Hal ini ditandai

dengan ditemukannya tulisan tertua (tulisan huruf Palawa bahasa Sansekerta) oleh para ilmuwan sejarah di dekat Bogor dan Kutai.

Pendidikan. Pendidikan pada zaman ini, selain diselenggarakan di dalam keluarga dan didalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut *Perguruan (Paguron)* atau *Pesantren*. Hal ini sebagaimana telah berlangsung di kerajaan Tarumanegara dan Kutai. Pada awalnya yang menjadi *pendidik (guru atau pandita)* adalah kaum Brahmana, kemudian lama kelamaan para empu menjadi guru menggantikan kedudukan para Brahmana. Terdapat tingkatan guru: pertama, *guru (perguruan) keraton*, di sini yang menjadi murid-muridnya adalah para anak raja dan bangsawan; kedua adalah *guru (perguruan) pertapa*, di sini yang menjadi murid-muridnya berasal dari kalangan rakyat jelata. Namun demikian para guru pertapa juga biasanya selektif dalam menerima seseorang untuk menjadi muridnya. Ini antara lain merupakan implikasi dari feodalisme yang berkembang saat itu. *Pendidikan bersifat aristokratis*, artinya masih terbatas hanya untuk minoritas yaitu anak-anak kasta Brahmana dan Ksatria, belum menjangkau masyarakat mayoritas, yaitu anak-anak kasta Waisya dan Syudra, apalagi bagi anak-anak dari kasta Paria. Pada zaman ini pengelolaan pendidikan bersifat otonom, artinya para pemimpin pemerintahan (para raja) tidak turut campur mengenai pengelolaan pendidikan, pengelolaan pendidikan bersifat otonom di tangan para guru atau pandita.

Tujuan pendidikan pada umumnya adalah agar para peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, mampu membela diri dan membela negara. *Kurikulum pendidikannya* meliputi agama, bahasa sansekerta termasuk membaca dan menulis (huruf Palawa), kesusasteraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri (ilmu berperang). Sesuai dengan jenis lembaga pendidikannya (perguruan), maka *metode* atau cara-cara pendidikannya pun adalah "*Sistem Guru Kula*". Dalam sistem ini murid tinggal bersama guru di rumah guru atau asrama, murid mengabdikan dan sekaligus belajar kepada guru.

Pada zaman berkembangnya agama Budha yang berpusat di Kerajaan Sriwijaya (di Palembang), telah terdapat "Perguruan Tinggi Budha". Selain dari dalam negeri sendiri, murid-muridnya juga berasal dari Tiongkok, Jepang, dan Indocina. Darmapala

sangat terkenal sebagai maha guru Budha. Perguruan-perguruan Budha menyebar ke seluruh wilayah kekuasaan Sriwijaya. Mungkin sekali candi Borobudur, Mendut, dan Kalasan merupakan pusat-pusat pendidikan agama Budha. Perhatikan hasil sastra yang ditulis para empu (pujangga) yang bermutu tinggi. Contoh: Pararaton, Negara Kertagama, Arjuna Wiwaha, dan Baratayuda. Para pujangga yang terkenal antara lain Empu Kanwa, Empu Seddah, Empu Panuluh, dan Empu Prapanca (Idit suhendi, dkk, 1991).

3. Zaman Kerajaan Islam

Latar Belakang Sosial Budaya. Nusantara memiliki letak yang strategis dalam rangka pelayaran dan perdagangan. Ke negeri kita berdatangan pula para saudagar beragama Islam. Melalui mereka para raja dan masyarakat pesisir memeluk agama Islam. Pada pertengahan abad ke-14, kota Bandar Malaka ramai dikunjungi para saudagar dari Asia Barat dan Jawa (Majapahit). Melalui para saudagar dari Jawa yang masuk memeluk agama Islam, maka tersebarlah Islam ke pulau Jawa. Dalam penyebaran agama Islam di pulau Jawa Anda juga mungkin masih ingat akan jasa para wali yang dikenal sebagai *Wali Sanga*. Akhirnya berdirilah kerajan-kerajaan Islam.

Pemerintahan pada zaman ini dipimpin oleh raja. Di dalam wilayah kerajaan-kerajaan Islam umumnya masyarakat tidak menganut stratifikasi sosial berdasarkan kasta. Sesuai ajaran Islam, masyarakat tidak membedakan manusia berdasarkan keturunan atau kasta. Sekalipun zaman ini masih tetap terdapat kelompok raja dan para bangsawan/para pegawai di satu pihak, dan terdapat kelompok rakyat jelata di pihak lain, namun feodalisme di kalangan masyarakat pada umumnya mulai ditinggalkan.

Pendidikan. *Tujuan pendidikan* pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia bertaqwa kepada Allah S.W.T., sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui “iman, ilmu dan amal”. Selain berlangsung di dalam keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti: di langgar-langgar, mesjid, dan pesantren. Lembaga perguruan atau pesantren yang sudah ada sejak zaman Hindu-Budha dilanjutkan oleh para wali, ustadz, dan atau ulama Islam. *Kurikulum pendidikannya* tidak tertulis (tidak ada kurikulum formal). Pendidikan berisi tentang tauhid (pendidikan keimanan terhadap Allah S.W.T.), Al-Qur’an, hadist, fikih, bahasa Arab termasuk membaca dan menulis huruf Arab.

Pendidikan adalah hak semua orang, bahkan semua orang wajib mencari ilmu, mendidik diri atau belajar. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam bersifat *demokratis*. Pada zaman ini pendidikan dikelola oleh para ulama, ustadz atau guru. Raja tidak ikut campur dalam pengelolaan pendidikan (pengelolaan pendidikan bersifat otonom).

Metode atau cara-cara pendidikan. Pendidikan dilakukan dengan metode yang bervariasi, tergantung dengan sifat materi pendidikan, tujuan, dan peserta didiknya. Contoh metode yang sering digunakan adalah: ceramah atau *tabligh* (wetonan) untuk menyampaikan materi ajar bagi orang banyak (belajar bersama) biasanya dilakukan di mesjid; mengaji Al-Qur'an dan *sorogan* (cara-cara belajar individual). Dalam metode sorogan walaupun para santri bersama-sama dalam satu ruangan, tetapi mereka belajar dan diajar oleh ustadz secara individual. Cara-cara belajar dilakukan pula melalui *nadoman* atau lantunan lagu. Selain itu dilakukan pula melalui media dan cerita-cerita yang telah digunakan para pandita Hindu-Budha, hanya saja isi ajarannya diganti dengan ajaran yang Islami. Demikian pula dalam sistem pesantren atau pondok asrama. Di langgar atau surau, selain melaksanakan shalat, biasanya anak-anak belajar mengaji Al-Qur'an dan materi pendidikan yang sifatnya mendasar. Adapun materi pendidikan yang lebih luas dan mendalam dipelajari di pesantren.

4. Zaman Pengaruh Portugis dan Spanyol.

Latar Belakang Sosial-Budaya. Pada awal abad ke-16 ke negeri kita datanglah bangsa Portugis, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang kedatangan mereka juga disertai oleh *missionaris* yang bertugas menyebarkan agama Katholik. Pada akhir abad ke-16 mereka meninggalkan negeri ini karena sering mendapat pemberontakan terutama dari Sultan Ternate, karena perdagangan rempah-rempah sudah tidak menguntungkan lagi, dan karena kalah dalam peperangan melawan Belanda.

Pendidikan. Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katholik. Demi kepentingan tersebut, tahun 1536 mereka mendirikan sekolah (*Seminarie*) di Ternate, selain itu didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat terkemuka. Pendidikan yang lebih tinggi diselenggarakan di Gowa, pusat kekuasaan

Portugis di Asia. Pemuda-pemuda yang berbakat dikirim ke sana untuk dididik. Pada tahun 1546, di Ambon telah ada tujuh kampung yang penduduknya memeluk agama Nasrani Katolik.

5. Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda.

Latar Belakang Sosial Budaya. Pada tahun 1596 bangsa Belanda telah datang ke negeri kita. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk berdagang. Pada tahun 1602 mereka mendirikan VOC. Karena VOC merupakan badan perdagangan milik orang-orang Belanda yang beragama Protestan, maka selain berupaya menguasai daerah untuk berdagang, juga untuk menyebarkan agama Protestan. Kekuasaan VOC akhirnya diserahkan kepada Pemerintah Negeri Belanda, karena itu sejak tahun 1800-1942 negeri kita menjadi jajahan Pemerintah Kolonial Belanda.

Karakteristik kondisi sosial budaya pada zaman ini antara lain: (1) berlangsungnya kolonialisme, (2) dalam bidang ekonomi berlangsung monopoli perdagangan hasil pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar dunia, (3) terdapat stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa dengan urutan dari lapisan tertinggi s.d. terbawah sebagai berikut: bangsa Belanda, golongan orang Timur Asing, golongan Priyayi/Bangsawan Pribumi, dan golongan Rakyat Jelata Pribumi.

Sejak berkuasanya bangsa Belanda, bangsa kita ditindas dan diadu domba, kekuasaan para raja dirampasnya, dan kekayaan alam Indonesia diangkutnya. Sesungguhnya bangsa Indonesia terus berjuang melawan penjajahan ini, perlawanan dan pemberontakan dilakukan oleh berbagai kelompok bangsa kita di berbagai daerah di tanah air. Penjajahan yang telah berlangsung lama benar-benar telah mengungkung kemajuan bangsa Indonesia, dan mengakibatkan kemelaratan serta kebodohan. Seiring perjuangan bangsa yang tak pernah padam, pada awal abad ke-20 muncul tekanan serta kecaman kaum humanis dan kaum sosial demokrat di Belanda atas kekeliruan politik penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Keadaan ini akhirnya memaksa pemerintah kolonial Belanda untuk melaksanakan *Politik Etis* (1901).

Dengan semakin sadarnya bangsa Indonesia akan makna nasionalisme dan kemerdekaan, pada awal abad ke-20 (sejak kebangkitan nasional tahun 1908) lahir berbagai pergerakan. Pergerakan nasional berlangsung dalam jalur politik maupun

pendidikan. Coba Anda urai kembali sejarah berbagai perkumpulan atau organisasi pergerakan nasional beserta usaha-usahanya yang timbul sejak Kebangkitan Nasional tahun 1908 sebagaimana telah Anda pelajari di SMP dan SMA.

Pendidikan. Implikasi dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial-budaya di Indonesia pada zaman ini, secara umum dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu: Pertama, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda; Kedua, pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan Kaum Pergerakan Kebangsaan (Pergerakan Nasional) sebagai sarana perjuangan demi merebut kembali kemerdekaan dan sebagai upaya rintisan ke arah pendidikan nasional. Berikut ini mari kita kaji kondisi pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Adapun pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan Kaum Pergerakan Nasional akan kita kaji pada kegiatan pembelajaran 2.

a. Pendidikan Zaman VOC

Pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC. VOC menyelenggarakan sekolah dengan *tujuan* untuk misi keagamaan (Protestan), bukan untuk misi intelektualitas, adapun tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintahan dan gereja. Sekolah-sekolah utamanya didirikan di daerah-daerah yang penduduknya memeluk Katholik yang telah disebarkan oleh bangsa Portugis. Sekolah pertama didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607. Sampai dengan tahun 1627 di Ambon telah berdiri 16 sekolah, sedangkan di pulau-pulau lainnya sekitar 18 sekolah.

Kurikulum pendidikannya berisi pelajaran agama Protestan, membaca dan menulis. Kurikulum pendidikan belum bersifat formal (belum tertulis), dan lama pendidikannya pun tidak ditentukan dengan pasti. *Murid-muridnya* berasal dari anak-anak pegawai, sedangkan anak-anak rakyat jelata tidak diberi kesempatan untuk sekolah. Pada awalnya yang menjadi *guru* adalah orang Belanda, kemudian digantikan oleh penduduk pribumi, yaitu mereka yang sebelumnya telah dididik di Belanda.

Selama kira-kira 200 tahun berkuasa di negeri kita, pendidikan yang dilaksanakan VOC benar-benar sangat sedikit sekali. Sampai tahun 1779 jumlah murid pada sekolah VOC adalah sbb: Batavia 639 orang, pantai utara Jawa 327 orang, Makasar

50 orang, Timor, 593 orang, Sumatera barat 37 orang, Cirebon 6 orang, Banten 5 orang, Maluku 1057 orang, dan Ambon 3966 orang (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1976).

b. Pendidikan Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda.

Sebagai kelanjutan dari zaman VOC, pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda pun mengecewakan bangsa Indonesia. *Kebijakan dan praktek pendidikan* pada zama ini antara lain:

- 1) Tahun 1808 Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan agar para bupati di Pulau Jawa menyebarkan pendidikan bagi kalangan rakyat, tetapi kebijakan ini tidak terwujud.
- 2) Tahun 1811-1816 ketika pemerintahan di bawah kekuasaan Raffles pendidikan bagi rakyat juga diabaikan.
- 3) Tahun 1816 Komisaris Jenderal C.G.C. Reindwardt menghasilkan Undang-undang Pengajaran yang dianggap sebagai dasar pendirian sekolah, tetapi Peraturan Pemerintah yang menyertainya yang dikeluarkan tahun 1818 tidak sedikit pun menyangkut perluasan pendidikan bagi rakyat Indonesia, melainkan hanya berkenaan dengan pendidikan bagi orang-orang Belanda dan golongan Pribumi penganut Protestan.
- 4) Selanjutnya, di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch dikeluarkan kebijakan *Culturstelsel* (Tanam Paksa) demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya bagi Belanda. Karena untuk hal ini dibutuhkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang banyak, maka tahun 1848 Gubernur Jenderal diberi kuasa untuk menggunakan dana anggaran belanja negara sebesar f 25.000 tiap tahunnya untuk mendirikan sekolah-sekolah di Pulau Jawa dengan tujuan menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Pada tahun 1849-1852 didirikan 20 sekolah (di tiap keresidenan). Namun sekolah ini hanya diperuntukan bagi anak-anak Pribumi golongan priyayi/bangsawan, sedangkan anak-anak rakyat jelata tidak diperkenankan. Penyelenggaraan pendidikan bagi kalangan bumi putera yang dicanangkan sejak 1848 mengalami hambatan karena kekurangan guru dan mengenai bahasa pengantarnya. Maka pada tahun 1852 didirikanlah *Kweekschool* (sekolah guru) pertama di Surakarta, dan menyusul di kota-kota lainnya. Sekolah ini pun hanyalah untuk anak-anak golongan priyayi.

- 5) Pada tahun 1863 dan 1864 keluar kebijakan bahwa penduduk pribumi pun boleh diterima bekerja untuk pegawai rendahan dan pegawai menengah di kantor-kantor dengan syarat dapat lulus ujian. Syarat-syarat ini ditetapkan oleh putusan Raja pada tgl. 10 September 1864. Demi kepentingan itu di Batavia didirikanlah semacam sekolah menengah yang disempurnakan menjadi HBS (*Hogere Burger School*).
- 6) Tahun 1867 didirikan Departemen Pengajaran Ibadat dan Kerajinan.
- 7) Tahun 1870 UU Agraris dari De Waal yang memberikan kesempatan kepada pihak partikelir untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan pegawai. Hal ini berimplikasi pada perluasan sekolah.
- 8) Tahun 1893 keluar kebijakan diferensiasi sekolah untuk Bumi Putera, yaitu Sekolah Kelas I untuk golongan priyayi, sedangkan Sekolah Kelas II untuk golongan rakyat jelata.
- 9) Setelah dilaksanakannya *Politik Etis*, pada tahun 1907 Gubernur Jenderal Van Heutsz mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan Bumi Putera: pertama, mendirikan Sekolah Desa yang diselenggarakan oleh Desa, bukan oleh Gubernur. Biaya dsb. menjadi tanggung jawab pemerintah desa; kedua, memberi corak sifat ke-Belanda-an pada Sekolah Kelas I. Maka tahun 1914 Sekolah Kelas I diubah menjadi HIS (*Holands Inlandse School*) 6 tahun dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Sedangkan Sekolah Kelas II tetap bernama demikian atau disebut *Vervoleg School* (sekolah sambungan) dan merupakan lanjutan dari Sekolah Desa yang didirikan mulai tahun 1907. Akibat dari hal ini, maka anak-anak pribumi mengalami perpecahan, golongan yang satu merasa lebih tinggi dari yang lainnya.
- 10) Pada tahun 1930-an usaha perluasan pendidikan bagi Bumi Putera mengalami hambatan. Surat Menteri Kolonial Belanda Colijn kepada Gubernur Jenderal de Jonge pada 10 Oktober 1930 menyatakan bahwa perluasan sekolah negeri jajahan terutama untuk kaum Bumi Putera akan sulit karena kekurangan dana.

Dalam periode pemerintahan kolonial Belanda, betapa kecilnya usaha-usaha pendidikan bagi kalangan Bumi Putera. Sampai akhir tahun 1940 jumlah penduduk bangsa Indonesia 68.632.000, sedangkan yang bersekolah hanya 3,32%.

Ciri-ciri pendidikan. Ciri-ciri pendidikan zaman ini antara lain: pertama, minimnya partisipasi pendidikan bagi kalangan Bumi Putera, pendidikan umumnya

hanya diperuntukan bagi bangsa Belanda dan anak-anak bumi putera dari golongan priyayi; kedua, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Tilaar (1995) mengemukakan lima ciri pendidikan zaman kolonial Belanda, yaitu: 1) Adanya *Dualisme pendidikan*, yaitu pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan Bumi Putera; 2) *Sistem Konkordansi*, yaitu pendidikan di daerah jajahan diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan di Belanda. Bagi Bumi Putera hal ini di satu pihak memberi efek menguntungkan, sebab penyelenggaraan pendidikan menjadi relatif sama, tetapi di pihak lain ada efek merugikan dalam hal pembentukan jiwa kaum Bumi Putera yang asing dengan budaya dan bangsanya sendiri; 3) *Sentralisasi pengelolaan pendidikan* oleh pemerintahan kolonial Belanda; 4) *Menghambat gerakan nasional*; dan 5) *Munculnya perguruan swasta yang militan demi perjuangan nasional (kemerdekaan)*.

Latihan:

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar ini, coba Anda rumuskan kembali: 1) tujuan pendidikan dan kurikulum pendidikan pada zaman Purba. 2) Pada zaman kerajaan Hindhu pendidikan bersifat aristokratis. Kemukakan dasar-dasar sosial budayanya ! 3) Kemukakan jenis-jenis lembaga pendidikan yang diselenggarakan pada zaman kerajaan Islam! 4) Apakah tujuan penyelenggaraan pendidikan zaman pengaruh Portugis dan Spanyol? 5) kemukakan ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda!

Petunjuk Jawaban Latihan:

Untuk dapat menjawab tugas latihan no. 1) Anda perlu mengkaji kembali konsep tujuan pendidikan dan kurikulum pendidikan pada zaman Purba. Untuk menjawab latihan no. 2) Anda perlu menganalisis implikasi dari munculnya kerajaan-kerajaan, feodalisme dan stratifikasi sosial yang berkembang zaman kerajaan Hindhu. 3) keluarga, langgar, mesjid, dan pesantren. 4) Penyebaran agama Katholik. Untuk menjawab latihan no. 5) Anda perlu mengidentifikasi ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Belanda berdasarkan latar belakang budaya saat itu (politik, ekonomi, dsb.).

Rangkuman:

Zaman Purba. Kebudayaan zaman ini dikenal sebagai paleolitik dan neolitik, masyarakat tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas (egaliter), adapun kepercayaan yang dianut adalah animisme dan dinamisme. Implikasinya, pendidikan bertujuan agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap adat dan nilai-nilai religi. Saat ini pendidikan berlangsung di dalam keluarga dan kehidupan masyarakat secara alamiah (belum berlangsung secara formal).

Zaman Kerajaan Hindu-Budha. Kedatangan saudagar-saudagar dari India telah mengakibatkan perubahan sosial budaya penduduk pribumi. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kerajaan dan feodalisme, tersebarnya agama Hindu dan Budha, munculnya stratifikasi sosial berdasarkan kasta, dan dimulainya zaman sejarah. Implikasinya, pendidikan pada zaman ini selain diselenggarakan di dalam keluarga dan masyarakat juga telah berlangsung di *perguruan atau pesantren*. Pendidikan bertujuan agar peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat, membela diri, dan membela negara. Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa Sansekerta termasuk membaca dan menulis (huruf Palawa), kesusasteraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri (ilmu berperang). Khususnya zaman Hindu pendidikan bersifat *aristokratis*. Adapun metode pendidikannya adalah *sistem guru kula*. Pada zaman Kerajaan Budha sudah berdiri “Perguruan Tinggi Budha” yang mana murid-muridnya berdatangan dari berbagai negara tetangga. Pengelolaan pendidikan bersifat otonom dimana pemerintah tidak ikut campur dalam mengelola sistem pendidikan.

Zaman Kerajaan Islam. Kedatangan para saudagar beragama Islam telah mengakibatkan perubahan di dalam masyarakat pribumi. Antara lain tersebarnya agama Islam dan kebudayaan yang bercorak Islami. Pemerintahan tetap berbentuk kerajaan, namun bagi kalangan muslim stratifikasi social sebagaimana berlaku pada zaman sebelumnya mulai ditinggalkan. Implikasinya, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT agar selamat dunia akhirat melalui pelaksanaan iman, ilmu dan amal. Selain di dalam keluarga pendidikan berlangsung juga di langgar-langgar, mesjid, dan pesantren. Pendidikan bersifat *demokratis*; seperti pada zaman-zaman sebelumnya pemerintah tidak ikut campur dalam pengelolaan pendidikan (otonom). Kurikulumnya meliputi tauhid (pendidikan keimanan

terhadap Allah S.W.T.), Al-Qur'an, hadist, fikih, bahasa Arab termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Metode pendidikan dilakukan melalui *tabligh (wetonan)* dan *sorogan* (cara-cara belajar individual), selain itu digunakan pula media dan ceritera-ceritera yang digunakan pada zaman Hindu-Budha hanya saja isinya diganti dengan ajaran yang Islami. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang muncul zaman kerajaan Hindu-Budha diselenggarakan pula pada zaman kerajaan Islam dan bahkan sampai dewasa ini.

Zaman portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang, tetapi selain itu mereka pun (para missionaris) bertujuan menyebarkan agama Katholik. Implikasinya, pendidikan zaman ini utamanya dimaksudkan demi penyebaran agama Katholik. Tahun 1536 didirikan sekolah (*Seminarie*) di Ternate, selain itu didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat terkemuka.

Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada awalnya (1596) bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang, mereka mendirikan VOC (1602). Selain berusaha menguasai daerah untuk berdagang, juga untuk menyebarkan agama Protestan. Sejak tahun 1800-1942 negeri kita menjadi jajahan Pemerintah Kolonial Belanda. Karakteristik kondisi sosial budaya pada zaman ini antara lain: (1) berlangsungnya penjajahan, kolonialisme; (2) dalam bidang ekonomi berlangsung monopoli perdagangan hasil pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar dunia; (3) terdapat stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa.

Bangsa Indonesia terus berjuang melawan penjajahan Belanda, perlawanan dan pemberontakan dilakukan oleh berbagai kelompok bangsa kita di berbagai daerah di tanah air. Penjajahan yang telah berlangsung lama benar-benar telah mengungkung kemajuan bangsa Indonesia, dan mengakibatkan kemelaratan serta kebodohan. Dengan semakin sadarnya bangsa Indonesia akan makna nasionalisme dan kemerdekaan, pada awal abad ke-20 (sejak kebangkitan nasional tahun 1908) lahirlah berbagai pergerakan. Pergerakan nasional berlangsung dalam jalur politik maupun pendidikan.

Implikasi dari kondisi di atas, pada zaman kolonial Belanda secara umum dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu: pendidikan yang

diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional. Ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonialisme Belanda yaitu: (1) Tujuan pendidikannya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja murah dan demi mendukung kelanggengan penjajahan. (2) adanya dualisme pendidikan, (3) sistem konkordansi, (4) sentralisasi pengelolaan pendidikan, (5) menghambat gerakan nasional.

Test Formatif 1

Jawablah semua soal di bawah ini:

1. Kemukakan rumusan tujuan pendidikan pada zaman Purba.
2. Di bandingkan dengan kondisi pendidikan pada zaman Purba, perubahan atau perkembangan apa yang terjadi dalam pendidikan pada zaman Kerajaan Hindu/Budha ?
3. Pada zaman Kerajaan Islam pendidikan bersifat demokratis, apa maksudnya dan mengapa demikian (apa dasarnya) ?
4. Apakah tujuan pendidikan pada zaman Portugis/Spanyol ?
5. Pemerintah kolonial Belanda memberlakukan *dualisme* dan *sistem konkordansi* dalam penyelenggaraan pendidikan bagi kaum Bumi Putra. Mengapa demikian (apa dasar sosial budaya dan tujuan pendidikannya), serta kemukakan untung ruginya bagi kaum Bumi Putra!

Balikan dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat pada bagian akhir BBM ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{5} \times 100 \%$$

Kriteria Tingkat Penguasaan:

90 % - 100 % = Baik Sekali.

80 % - 89 % = Baik.

70 % - 79 % = Cukup.

< 69 % = Kurang.

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari Kegiatan Belajar selanjutnya. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Kegiatan Belajar 2

PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN KAUM PERGERAKAN KEBANGSAAN (PERGERAKAN NASIONAL) DAN PENDIDIKAN ZAMAN PENDUDUKAN MILITERISME JEPANG

Kegiatan belajar ini menyajikan sejarah pendidikan Indonesia pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda yang diselenggarakan Kaum Pergerakan, dan pendidikan pada zaman Pendudukan Militerisme Jepang. Kajian sejarah pendidikan tersebut meliputi latar belakang sosial budayanya dan implikasinya terhadap pendidikan. Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar ini Anda akan dapat menjelaskan pendidikan yang diselenggarakan Kaum Pergerakan sebagai upaya perjuangan kemerdekaan dan rintisan pendidikan nasional, serta dapat menjelaskan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Pendudukan Militerisme Jepang.

1. Pendidikan oleh Kaum Pergerakan Kebangsaan (Pergerakan Nasional) sebagai Sarana Perjuangan Kemerdekaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

Latar Belakang Sosial Budaya Timbulnya Pergerakan Nasional. Telah Anda pahami melalui kegiatan pembelajaran 1 bahwa kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan sangat merugikan bangsa Indonesia. Penderitaan yang dilakukan Belanda terhadap bangsa dan kekayaan Indonesia, telah menimbulkan penderitaan/kemiskinan. Perbedaan kedudukan dan kehidupan yang mencolok antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia sangat nyata, baik dalam kedudukan sosial maupun pemberian gaji. Stratifikasi sosial, sistem dualisme dan konkordansi dalam bidang pendidikan telah menimbulkan rendahnya kesempatan pendidikan yang diberikan kepada bangsa Indonesia, juga menimbulkan perpecahan dan kebodohan. Selain itu, pendidikan bagi bangsa kita hanya ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah untuk mendukung sistem ekonomi dan politik kolonialisme. Pendidikan kolonial Belanda tidak memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu dan merdeka.

Berbagai kondisi yang sangat merugikan bangsa Indonesia akibat kebijakan dan praktek-praktek penjajahan tersebut di atas, telah menimbulkan rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang dijajah sehingga muncul rasa

kebangsaan/nasionalisme. Kebesaran masa lampau bangsa kita semasa zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dsb., juga memperkuat rasa harga diri sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Sebab itu, kaum terpelajar di kalangan bangsa kita terdorong untuk berperan menjadi motor pergerakan. Bahasa melayu yang merupakan bahasa kesatuan makin menyadarkan bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa. Selain itu, karena mayoritas bangsa Indonesia memeluk agama Islam, maka timbul persepsi bahwa Belanda adalah Kafir. Itulah antara lain faktor-faktor intern (faktor-faktor yang terjadi di dalam negeri) yang menimbulkan pergerakan kebangsaan/pergerakan nasional.

Sejak Kebangkitan Nasional (1908) sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik melalui jalur politik praktis, jalur ekonomi, sosial-budaya, dan khususnya melalui jalur *pendidikan*. Sifat perjuangan bangsa kita saat itu tidak lagi hanya menitik beratkan pada perjuangan fisik. Mengingat ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda yang tidak memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu, dan merdeka, maka kaum pergerakan semakin menyadari bahwa pendidikan yang bersifat nasional harus segera dimasukkan ke dalam program perjuangannya. Usaha-usaha kaum pergerakan melalui jalur pendidikan demi kemerdekaan dan rintisan ke arah pendidikan nasional tampak jelas. Hampir setiap organisasi pergerakan nasional mencantumkan dan melaksanakan pendidikan dalam anggaran dasar dan/atau dalam program kerjanya.

Pendidikan. I Djumhur dan H. Danasuparta (1976) mengemukakan bahwa setelah tahun 1900 usaha-usaha partikelir di bidang pendidikan berlangsung dengan sangat giatnya. Untuk mengubah keadaan akibat penjajahan, kaum pergerakan memasukan pendidikan ke dalam program perjuangannya. Dewasa ini lahir lah sekolah-sekolah partikelir (perguruan nasional) yang diselenggarakan para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu mula-mula bercorak dua:

- 1) Sekolah-sekolah yang sesuai haluan politik, seperti yang diselenggarakan oleh: Ki Hadjar Dewantara (Taman Siswa), Dr. Douwes Dekker atau Dr. Setyabudhi (Ksatrian Institut), Moch. Sjafei (INS Kayutanam) dsb.
- 2) Sekolah-sekolah yang sesuai tuntutan agama (Islam), seperti yang diselenggarakan oleh: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sumatera Tawalib di Padangpanjang, dll

Selain itu, sebelumnya telah diselenggarakan pula pendidikan oleh tokoh-tokoh wanita seperti R.A. Kartini (di Jepara), Rd. Dewi Sartika (di Bandung), dan Rohana Kuddus (di Sumatera).

Kebijakan dan praktek pendidikan yang diselenggarakan rakyat dan kaum pergerakan *antara lain* sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. R.A. Kartini, Rd. Dewi Sartika, dan Rohana Kuddus.

Sekalipun tinggal di daerah yang berjauhan, R.A. Kartini, Rd. Dewi Sartika, dan Rohana Kuddus menghadapi masalah yang relatif sama. Mereka melihat kepincangan dalam masyarakat dan ketidakadilan terhadap wanita, sehingga menghambat kemajuan kaum wanita karena adat kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Sebab itu, baik R.A. Kartini, Dewi Sartika, maupun Rohana Kudus memiliki cita-cita yang relatif sama pula, yaitu keinginan untuk bebas, berdiri sendiri, serta membebaskan kaum wanita (gadis-gadis) Indonesia lainnya dari ketertinggalan dan ikatan adat kebiasaan. Mereka masing-masing berupaya memperjuangkan emansipasi kaum wanita demi perbaikan kedudukan dan derajat kaum wanita untuk mengejar kemajuan melalui upaya pendidikan. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan mereka adalah:

- **R.A. Kartini (1879-1904):** Pada tahun 1903 ia membuka “Sekolah Gadis” di Jepara, dan setelah menikah ia membukanya lagi di Rembang. Karena usianya yang relatif pendek usaha Kartini di bidang pendidikan tidak terlalu banyak, namun ia telah memberikan petunjuk jalan, melakukan rintisan pendidikan bagi kaum wanita. Cita-citanya memberikan gambaran perjuangan dan cita-cita kaum wanita Indonesia.
- **Rd. Dewi Sartika (1884-1947):** Pada tahun 1904 ia mendirikan “Sakola Isteri” (Sekolah Isteri). Murid pertamanya berjumlah 20 orang, makin lama muridnya bertambah. Pada tahun 1909 sekolah ini melepas lulusannya yang pertama dengan mendapat ijazah. Pada tahun 1912 di 9 kabupaten seluruh Pasundan telah dijumpai sekolah semacam Sekolah Isteri Dewi Sartika. Pada tahun 1914 Sekolah Isteri diganti namanya menjadi “Sakola Kautamaan Isteri” (Sekolah Keutamaan Isteri), dan pada tahun 1920 tiap-tiap kabupaten di seluruh Pasundan mempunyai Sakola Kautamaan Isteri. Adapun untuk melestarikan sekolah-sekolahnya itu dibentuk “Yayasan Dewi Sartika”.

- **Rohana Kuddus (1884- 1969):** Rohana Kuddus dikenal sebagai wanita Islam yang taat pada agamanya dan sebagaimana kedua tokoh di atas ia giat sekali memelopori emansipasi wanita. Selain sebagai pendidik, ia pun adalah wartawan wanita pertama Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan I. Djumhur dan H. Danasuparta (1976), pada tahun 1896 (pada usia 12 tahun) Rohana telah mengajarkan membaca dan menulis (huruf Arab dan Latin) kepada teman-teman gadis sekampungnya. Pada tahun 1905 ia mendirikan Sekolah Gadis di Kota Gedang. Pada tgl. 11 Februari 1911 ia memimpin Perkumpulan Wanita Minangkabau yang diberi nama “Kerajinan Amai Setia” yang kemudian dijadikan nama sekolahnya. Rohana juga berjuang menerbitkan surat kabar khusus untuk wanita. Pada tgl 10 Juli 1912 Rohana menjadi pemimpin redaksi surat kabar wanita di kota Padang yang diberi nama “Soenting Melajoe”.

Kurikulum pendidikan mereka memiliki kesamaan pula, yaitu berkenaan dengan membaca, menulis, berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan kewanitaan agar mereka dapat berkarya.

b. Budi Utomo

Pada tahun 1908 Budi Utomo dalam kongresnya yang pertama (3-4 Oktober 1908) menegaskan bahwa tujuan perkumpulan itu adalah untuk kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa Indonesia, terutama dengan memajukan *pengajaran*, pertanian, peternakan, dagang, teknik industri, dan kebudayaan. Untuk itu Budi Utomo pada tahun 1913 mendirikan *Darmo-Woro Studiefonds*; dan mendirikan tiga Sekolah Netral di Solo dan dua di Yogyakarta. Pada tahun 1918 mendirikan Kweekschool di Jawa Tengah, kemudian Sekolah Guru Kepandaian Putri untuk Sekolah Kartini, enam Normaal School, dan sepuluh Kursus Guru Desa, dsb. Pada tahun itu sekolah-sekolah Budi Utomo telah berkembang hingga jumlahnya kurang lebih mencapai 480 (H.A.R. Tilaar, 1995).

c. Muhammadiyah

Pada tanggal 18 November 1912 K. H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta. Muhammadiyah dengan berbagai sekolahnya, didirikan dalam rangka memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri, untuk mengatasi kristenisasi, dan

untuk mewujudkan masyarakat Islam yang melaksanakan ajaran al-Qur'an dan Hadits sesuai yang diajarkan Rosululloh (Nabi Muhammad S.A.W).

Dasar/asas dan Tujuan Pendidikan. Pendidikan Muhammadiyah berasaskan Islam dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah membentuk manusia muslim berakhlak mulia, cakap, percaya diri dan berguna bagi masyarakat. Sebagai orang muslim harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berjiwa tauhid yang murni; beribadah kepada Allah; berbakti kepada orang tua dan baik kepada kerabatnya; memiliki akhlak yang mulia dan halus perasaannya; berilmu pengetahuan dan mempunyai kecakapan; dan cakap memimpin keluarga dan masyarakat (Abu Ahmadi, 1975).

Penyelenggaraan Pendidikan. Untuk mencapai tujuannya Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di bawah pimpinan Majelis Pengajaran. Sekolah-sekolah itu di samping memberikan pendidikan agama Islam, memberikan juga berbagai mata pelajaran seperti di sekolah-sekolah Pemerintah. Usaha-usaha lain berupa perluasan pengajian-pengajian (di bawah bimbingan Majelis Tabligh), menyebarkan bacaan-bacaan agama, mendirikan mesjid-mesjid, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, dan sebagainya.

Pada zaman Belanda, Muhammadiyah mempunyai bagian-bagian sekolah:

Taman Kanak-kanak (Busthanul Atfal)	Inheemse Mulo
Sekolah kelas II	Normaalschool
Sekolah Schakel	Kweekschool
HIS	HIK
MULO	AMS

Sekolah-sekolah agamanya:

- Ibtidaiyah (SD dengan dasar Islam)
- Tsanawiyah (Sekolah Lanjutan dengan dasar Islam)
- Diniyah, yang hanya meberikan pelajaran agama saja
- Mu'allimin/Muallimat (SGB Islam)
- Kulliyatul Mubaligin (SPG Islam)

Pada masa Pendudukan Jepang hingga kini organisasi Muhammadiyah dengan sekolah-sekolahnya berjalan terus. Pada tahun 70-an sekolah-sekolahnya berjumlah ±

6000 buah, tersebar di seluruh Indonesia; telah memiliki 17 Universitas dan 43 Akademi (I. Djumhur dan Danasuparta, 1976). Sampai kini Muhammadiyah terus berjuang dan berkembang dalam rangka mencapai cita-citanya.

d. Perkumpulan Putri Mardika. Perkumpulan Putri Mardika didirikan tahun 1912. Bertujuan memajukan pengajaran anak-anak perempuan (Odang Muchtar, 1976).

e. Trikoro Dharmo.

Pada tahun 1915 didirikan Trikoro Dharmo, dan selanjutnya berdiri berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar di berbagai tempat di tanah air hingga terwujudnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Berbagai organisasi pemuda dan pelajar ini bersama-sama gerakan lainnya menyumbangkan jasa-jasa yang besar demi pendidikan nasional dan kemerdekaan Indonesia. “Mereka bersepakat untuk memperbanyak kesempatan memperoleh pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah sehingga dapat menampung semakin banyak anak Indonesia, mempermudah untuk dapat mengikuti pelajaran bagi semua lapisan masyarakat, dan agar para anak didik mempunyai perasaan peka sebagai putra Indonesia” (H.A.R. Tilaar, 1995).

f. Perguruan Taman Siswa

Pada mulanya Ki Hadjar Dewantara (1889-1959) bersama rekan-rekannya berjuang di jalur politik praktis, selanjutnya mulai tahun 1921 perjuangannya difokuskan di jalur pendidikan. Hal ini Beliau lakukan mengingat Departemen Pengajaran Pemerintah Belanda bersikap diskriminatif mengenai hak dan penyelenggaraan pendidikan bagi bangsa kita. Pendidikan Kolonial tidak berdasarkan kebutuhan bangsa kita, melainkan hanya untuk memenuhi kepentingan kolonial. Isi pendidikannya tidak sesuai dengan kemajuan jiwa-raga bangsa. Pendidikan kolonial tidak dapat mengadakan perikehidupan bersama, sehingga kita selalu bergantung kepada kaum penjajah. Pendidikan kolonial tidak dapat menjadikan kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hadjar Dewantara keadaan ini (penjajahan) tidak akan lenyap jika hanya dilawan dengan pergerakan politik saja. Melainkan harus dipentingkan penyebaran benih hidup merdeka di kalangan rakyat dengan jalan pengajaran yang disertai pendidikan nasional (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1976). Sehubungan dengan hal di atas pada tgl. 3 Juli

1922 di Yogyakarta Ki Hadjar Dewantara mendirikan "National Onderwijs Institut Taman Siswa" yang kemudian menjadi "Perguruan Nasional Taman Siswa".

Dasar atau Azas Pendidikan. Pada pembukaan lembaga pengajaran Taman Siswa (3 Juli 1922), Ki Hadjar Dewantara mengemukakan tujuh azas pendidikannya yang kemudian dikenal dengan Azas Taman Siswa 1922. Ketujuh Azas tersebut adalah:

- 1) Hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri dengan wajib mengingat tertibnya kehidupan umum. Hendaknya tiap anak dapat berkembang menurut kodrat atau bakatnya. Dalam mendidik, perintah dan hukuman yang kita anggap memperkosa hidup kebatinan anak hendaknya ditiadakan. Mereka hendaknya dididik melalui "Among –methode".
- 2) Pengajaran berarti mendidik untuk menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, melainkan harus juga mendidik murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan mengamalkannya demi kepentingan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu yaitu yang bermanfaat bagi kepentingan lahir dan batin dalam hidup bersama.
- 3) Pendidikan hendaknya berasaskan kebudayaan kita sendiri sebagai penunjuk jalan, untuk mencari penghidupan baru, yang selaras dengan kodrat kita dan akan memberi kedamaian dalam hidup kita. Dengan keadaban bangsa kita sendiri kita lalu pantas berhubungan bersama-sama dengan bangsa asing.
- 4) Pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat umum daripada mempertinggi pengajaran kalau usaha mempertinggi ini mengurangi tersebarnya pengajaran.
- 5) Agar bebas, merdeka lahir batin, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri.
- 6) Agar hidup tetap dengan berdiri sendiri, maka segala belanja mengenai usaha kita harus dipikul sendiri dengan uang pendapatan sendiri.
- 7) Dengan tidak terikat lahir batin, serta kesucian hati, berminat kita berdekatan dengan Sang Anak. Kita tidak meminta sesuatu hak, akan tetapi menyerahkan diri untuk berhamba kepada Sang Anak.

Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Asas Taman Siswa 1922, pada tahun 1947 diubah menjadi "*Panca Dharma*" Taman Siswa, yaitu: 1) Kebebasan atau Kemerdekaan, 2) Kebudayaan, 3) Kodrat Alam, 4) Kebangsaan, dan 5) Kemanusiaan.

Tujuan Pendidikan. Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maka Maksudnya pendidikan yaitu: menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan pendidikan itu ialah kesempurnaan hidup lahir batin sebagai satu-satunya untuk mencapai hidup selamat dan bahagia manusia, baik sebagai satu-satunya orang (*individual*), maupun sebagai anggota masyarakat (*social*). (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977).

Penyelenggaraan Pendidikan. Berdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa (1922) dimulai dengan dibukanya sekolah untuk anak-anak di bawah umur 7 tahun yang diberi nama *Taman Lare* atau *Taman Anak* kadang diberi nama penjelasan "*Sekolah Froebel Nasional* atau *Kindertuin*". Sebutan *Taman Lare* atau *Taman Anak* untuk anak di bawah umur 7 tahun kemudian diganti namanya menjadi *Taman Indria*. Alasannya karena anak-anak di bawah umur 7 tahun itu semata-mata berada pada periode perkembangan pancainderanya.

Pada tahun-tahun berikutnya dibuka *Taman Anak* untuk anak-anak umur 7-9 tahun (kelas I-III); *Taman Muda* untuk anak-anak umur 10-13 tahun (kelas IV-VI), dan kelas VII sebagai kelas masyarakat; *Taman Dewasa* (setingkat SMP); *Taman Madya* (setingkat SMA); *Taman Guru*; dan *Taman Ilmu* (setingkat Sekolah Tinggi). *Taman Guru* meliputi: *Taman Guru BI*, yaitu sekolah guru untuk calon guru *Taman Anak* dan *Taman Muda* (satu tahun setelah *Taman Dewasa*); *Taman Guru BII* (satu tahun setelah *Taman Guru BI*); *Taman Guru BIII* (satu tahun setelah *Taman Guru BII*) yang menyiapkan calon guru *Taman Dewasa*. *Taman Guru BIII* terdiri atas dua bagian: *Bagian A* (*Alam/Pasti*), yaitu bagi para calon guru mata pelajaran alam/pasti; dan *Bagian B* (*Budaya*), yaitu bagi para calon guru mata pelajaran Bahasa, Sejarah, dsb. Pada *Taman Guru*, selain diselenggarakan *Taman Guru BI* s.d. *BIII*, juga diselenggarakan *Taman Guru Indriya*, yaitu sekolah guru yang menyiapkan para calon guru untuk *Taman Indriya*.

Metode Pendidikan. Cara atau metode pendidikannya adalah "*among-methode*" atau "*among system*", yaitu menyokong kodrat alamnya anak yang kita didik, agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri".

Dasar sistem among ini adalah kodrat alam dan kemerdekaan. (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977). Pendidikan dengan sistem among memakai cara pondok asrama, karena dengan cara itu dapatlah ketiga lingkungan pendidikan bekerja bersama-sama (keluarga, perguruan dan perkumpulan pemuda). Persatuan ketiga corak lingkungan tersebut penting sekali untuk sempurnanya pendidikan (*sistem tri-pusat pendidikan*). Pelaksanaan pendidikan tersebut berpedoman pula pada berbagai semboyan, adapun semboyan yang paling terkenal adalah “*Ing ngarso sung tulodo, Ing madya mangun karso, Tutwuri handayani*”. Artinya: Kalau pendidik berada di muka, dia memberi teladan kepada peserta didik. Kalau berada di tengah, membangun semangat, berswakarya, dan berkreasi pada peserta didik. Kalau berada di belakang, pendidik mengikuti dan mengarahkan peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Dengan kata lain, seorang pendidik atau pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntut, dan membimbing peserta didik/orang yang dipimpinya. Coba Anda berikan contoh perbuatan guru yang nyata sebagai bentuk pelaksanaan ketiga semboyan tersebut.

Perjuangan Taman Siswa terus berlanjut, sampai saat ini lembaga pendidikan Taman Siswa terus berkembang. Lembaga pendidikan Taman Siswa tersebar di seluruh pelosok tanah air.

g. Ksatrian Institut

Ksatrian Institut didirikan di Bandung oleh Ernest Francoist Eugene Douwes Dekker (Multatuli atau Setyabudhi). Ia memimpin lembaga ini sejak 1922-1940. Dasar pendidikannya adalah kebangsaan Indonesia, terutama melalui sejarah kebangsaan. Tujuan pendidikannya yakni menghasilkan ksatria (*ridderschap*) bagi Indonesia Merdeka di masa datang. Sekolah kejuruan merupakan organisasi dalam sistem pendidikan Ksatrian Institut, yang diharapkan agar lulusannya menjadi nasionalis yang berguna dan dapat berdiri sendiri serta mencari lapangan kerja yang praktis. Lulusannya umumnya mendapat tempat di perusahaan-perusahaan swasta atau berdiri sendiri. Sampai dengan tahun 1937 perkembangan sekolahnya telah mencapai 9 sekolah yang tersebar di Bandung, Ciwidey, dan Cijaur (Odang Muchtar, 1976).

h. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tgl 31 Januari 1926. Salah seorang ulama yang membangun perkumpulan NU adalah K.H. Hasyim Asy'ari, yang pernah menjadi Raisul Akbar perkumpulan ini. Sejak 1899 Beliau telah membuka pesantren Tebuireng di Jombang. Sebelum menjadi partai politik NU bertujuan: memegang teguh salah satu mazhab dari mazhab Imam yang ber-empat, yaitu: 1. Syafi'I, 2. Maliki, 3. Hanafi, 4. Hambali dan mengerjakan apa-apa yang menjadikan kemaslahatan untuk agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, diselenggarakan berbagai usaha seperti: memajukan dan memperbanyak pesantren dan madrasah serta mengadakan tabligh-tabligh dan pengajian-pengajian, disamping usaha lainnya. Pada akhir tahun 1938 Komisi Perguruan NU telah menetapkan susunan madrasah-madrasah sebagai berikut: Madrasah Awaliyah (2 tahun); Madrasah Ibtidaiyah (3 tahun); Madrasah Tsanawiyah (3 tahun); Madrasah Mu'alimin Wusytha (2 tahun); dan Madrasah Mu'alimin Ulya (3 tahun). Selanjutnya setelah menjadi partai politik (Mei 1952) hingga sekarang NU terus berjuang melakukan inovasi dan menyelenggarakan pendidikan (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1976)..

i. INS Kayutanam

Indonesisch Nederland School (INS) didirikan oleh Mohammad Sjafei (1895-1969) pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayutanam, Sumatera Barat. Pada tahun 1950 kepanjangan INS diubah menjadi *Indonesian Nasional School*, dan selanjutnya menjadi *Institut Nasional Sjafei*. Perjuangan INS juga diarahkan demi kemerdekaan melalui pendidikan yang menekankan lulusannya agar dapat berdiri sendiri tidak tergantung pada orang lain atau jabatan yang diberikan oleh kaum penjajah.

Dasar Pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ag. Soejono (1979) pada awal didirikannya INS mempunyai dasar pendidikan sebagai berikut:

- 1) *Berfikir secara logis atau rasional*. INS mementingkan berfikir logis sebab menurut kenyataan, dalam masyarakat Indonesia saat itu masih banyak orang yang berfikir secara mistik.
- 2) *Keaktifan atau kegiatan*. INS menggunakan banyak keaktifan anak dalam pengajaran, latihan skill dan pendidikan agar anak bekerja beraturan dan intensif. Lagi pula Moh.

Sjafei menyadari, bahwa besar sekali pengaruh keaktifan bagi pengalaman, fikir dan watak. Inilah sebabnya mata pengajaran ekspresi dinomorsatukan di INS dengan tidak mengabaikan pengetahuan lain. Keaktifan itu dipakainya pula untuk menjalankan pekerjaan yang praktis: membuat sendiri alat bercocok tanam, beternak, membuat gedung dan berbagai lapangan olah raga dengan mempergunakan bahan yang terdapat di Indonesia. Begitulah anak di sekolah tidak hanya duduk, melihat mendengarkan, dan percaya saja.

- 3) *Pendidikan kemasyarakatan*. Sesuai dengan sifat Indonesia, maka di INS diberikan banyak kesempatan bekerja sama. Contoh: Majalah Rantai Mas dikerjakan bersama dan merupakan tempat untuk mengadakan ekspresi dengan bahasa; bersama menjalankan pertunjukan dan koperasi. Perkumpulan koperasi bukan saja untuk memenuhi keperluan murid sehari-hari, melainkan juga sebagai latihan bekerja bersama dalam lapangan ekonomi, yang menanti mereka, apabila mereka kelak terjun ke dalam masyarakat. Bergotong royong adalah ciri khas Indonesia.
- 4) *Memperhatikan bakat anak*. Anak yang ternyata pandai dan mempunyai banyak kesanggupan dalam sesuatu mata pengajaran, setelah mengikuti semua mata pengajaran, mendapat pendidikan lebih lanjut dan mendalam untuk menyempurnakan bakat, hingga ia dapat menjadi ahli dalam vak itu.
- 5) *Menentang intelektualisme*. Hal tersebut di atas adalah beberapa usaha untuk menjauhkan intelektualisme dari INS. Sejalan dengan hal di atas, usaha-usaha yang lainnya adalah:
 - a. pendidikan keindahan diperhatikan sungguh-sungguh. Ini terbukti dengan dipentingkannya vak ekspresi; kerap diadakan pertunjukan; bersama-sama murid mengatur gedung dan halamannya, dsb.
 - b. Rasa tanggung jawab dikembangkan melalui berbagai keaktifan, agar anak didik berani berdiri sendiri. Penyelenggaraan dan perkembangan INS sendiri memberi contoh dalam hal ini. Atas usaha sendiri Moh. Sjafei menyelenggarakan INS yang megah itu. Tidak diterimanya bantuan dari pihak mana pun seperti dari pemerintah Belanda yang dapat mengikat hidup INS.
 - c. Perasaan keagamaan diberi kesempatan berkembang luas dan bersih jauh dari kepicingan dan kekolotan.

Tujuan Pendidikan INS. Tujuan pendidikan INS Kayutanam sebagaimana dikemukakan Umar Tirtarahardja dan La Sulo (1995) adalah sebagai berikut:

- 1) Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan.
- 2) Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat.
- 4) Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab.
- 5) Mengusahakan mandiri dalam pembiayaan.

Penyelenggaraan Pendidikan. Beberapa usaha yang dilakukan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam yang dalam bidang pendidikan antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, seperti Ruang Rendah (7 tahun, setara sekolah dasar), Ruang Dewasa (4 tahun sesudah Ruang Rendah, setara sekolah menengah), dan sebagainya. Di samping itu, INS Kayu Tanam juga menyelenggarakan usaha lain sebagai bagian mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni penerbitan *Sendi* (majalah anak-anak), buku bacaan dalam rangka pemberantasan buta huruf/aksara dan angka dengan judul *Kunci 13*, mencetak buku-buku pelajaran, dan lain-lain (Soejono, 1958:46). Seperti diketahui, upaya-upaya dari Ruang Pendidik INS tersebut dilakukan sebagai usaha mandiri, dan menolak bantuan yang mungkin akan membatasi kebebasannya.

- j. Pada bulan Juli Tahun 1927 dalam pidato pembelaannya Bung Hatta di pengadilan Den Haag mengusulkan supaya ada perbaikan dalam berbagai bidang sosial, antara lain adalah bidang pembinaan pendidikan nasional.
- k. Kongres Pasundan pada tahun 1930 juga menempatkan pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu sarana utama perjuangannya.
- l. Pada bulan November 1937 dalam kongres ke-26 Persatuan Guru Indonesia (PGI) di Bandung dirumuskan supaya diadakan wajib belajar. Pada Kongresnya tahun 1938 di Malang PGI menuntut agar pendidikan dan pengajaran diserahkan ke daerah tetapi didahului dengan perbaikan keuangan daerah.

Tentu saja masih banyak lagi usaha-usaha rakyat, partai dan organisasi yang berjuang dalam bidang pendidikan, seperti: Syarikat Islam (SI), perjuangan PNI, berbagai pesantren, dsb.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan praktek-praktek di bidang politik ekonomi, maupun pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial

Belanda sangat tidak adil. Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda tidak memungkinkan bangsa kita menjadi cerdas, bebas, bersatu dan merdeka. Selain itu kita dapat melihat bahwa Kebangkitan Nasional melahirkan kesadaran mengenai pentingnya peranan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam memperjuangkan kemerdekaan demi lahirnya negara nasional. Dalam periode ini berbagai pergerakan nasional mencantumkan program pendidikan bagi semua kalangan rakyat Indonesia. Selain itu, pada masa ini lahir pula konsepsi dan perintisan sistem pendidikan nasional Indonesia, maksudnya suatu sistem pendidikan yang berbeda dengan sistem pendidikan kolonial Belanda (Odang Muchtar, 1976). Terdapat tiga ciri pendidikan nasional (pendidikan kaum pergerakan) pada masa ini, yaitu: (1) bersifat nasionalistik dan sangat anti kolonialis, (2) berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri, dan (3) pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sebagai perwujudan harga diri yang tinggi dan kebhinekaan masyarakat Indonesia serta pentingnya pengembangan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia (H.A.R. Tilaar, 1995).

2. Pendidikan Zaman Pendudukan Militerisme Jepang.

Latar Belakang Sosial Budaya. Kekuasaan pemerintah kolonial Belanda berakhir ketika pada tgl. 8 Maret 1942 mereka menyerah kepada militer kerajaan Jepang. Selanjutnya bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan pendudukan militerisme Jepang selama hampir 3,5 tahun.

Jepang menyerbu Indonesia karena kekayaan negeri ini yang sangat besar artinya bagi kelangsungan perang Pasifik dan sesuai pula dengan cita-cita politik ekspansinya. Di balik itu, mereka mempropagandakan semboyan *Hakko Ichiu* atau semboyan “kemakmuran bersama” Asia Timur Raya. Mereka menyatakan bahwa mereka berjuang mati-matian melakukan “perang suci” (melawan sekutu) demi kemakmuran bersama Asia Timur Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Namun demikian tujuan pendudukan militer Jepang lama kelamaan menjadi penindasan. Ada dua kebijakan pemerintah pendudukan militer Jepang : 1) menghapuskan semua pengaruh Barat di Indonesia melalui “pen-Jepang-an”, dan 2) memobilisasi segala kekuatan dan sumber yang ada untuk mencapai kemenangan perang Asia Timur Raya.

Pendidikan. Implikasi kekuasaan pemerintahan pendudukan militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu:

- 1) Tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan perang Asia Timur Raya. Contoh: Tiap pagi di sekolah-sekolah dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang “*Kimigayo*”. Upacara pagi dilanjutkan dengan pengibaran bendera *Hinomaru* dan membungkuk untuk menghormati *Tenno Heika*. Tiap hari para siswa harus mengucapkan sumpah pelajar dalam bahasa Jepang, melakukan *taiso* (senam), dan diwajibkan pula melakukan *kinrohoshi* (kerja bakti). Selain itu, dibentuk PETA sebagai program pendidikan militer bagi para pemuda; dibentuk barisan murid-murid Sekolah Rakyat (*Seinen-tai*); dan barisan murid-murid Sekolah Lanjutan (*Gakuto-tai*).
- 2) Hilangnya Sistem Dualisme dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang bersifat dualistis membedakan dua jenis sekolah untuk anak-anak bangsa Belanda dan anak-anak Bumi Putera dihapuskan pada zaman Jepang. Sekolah bersifat terbuka untuk seluruh lapisan anak Indonesia. Namun demikian, hanya satu jenis sekolah rendah diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu: Sekolah Rakyat 6 tahun (*Kokumin Gakko*). Sekolah Desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi Sekolah Pertama. Susunan jenjang sekolah menjadi:
 - a. Sekolah Rakyat 6 tahun (termasuk Sekolah Pertama).
 - b. Sekolah Menengah 3 tahun.
 - c. Sekolah Menengah Tinggi 3 tahun.
 - d. Perguruan Tinggi.
- 3) Sistem Pendidikan menjadi lebih merakyat (populis). Sebagaimana dikemukakan di atas, pada prinsipnya terjadi perubahan bahwa sekolah menjadi terbuka bagi semua lapisan masyarakat (“*Demokrasi Pendidikan*”). Hapusnya sistem *Konkordansi* dan masuknya sistem baru yang relatif lebih praktis dan terarah bagi kebutuhan masyarakat, meskipun kepraktisan tersebut lebih berarti untuk keperluan kemenangan perang Jepang. Selain itu bahasa Indonesia pertama kalinya dijadikan bahasa pengantar di sekolah dan dijadikan bahasa ilmiah, di samping tentunya bahasa Jepang. Sedangkan bahasa Belanda dilarang untuk digunakan (H.A.R. Tilaar, 1995).

Latihan:

1. Setelah kebangkitan nasional (1908) perjuangan yang dilakukan kaum pergerakan kebangsaan (pergerakan nasional) tidak hanya melalui jalur politik praktis, melainkan juga melalui jalur pendidikan. Kemukakan latar belakang politik dan sosial budaya yang menjadi landasannya.
2. Kemukakan persamaan dan perbedaan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Taman Siswa dengan pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah!
3. Apa tujuan pendidikan zaman Pendudukan Militerisme Jepang?

Petunjuk Jawaban Latihan:

Untuk dapat menjawab tugas no. 1. Anda mesti memperhatikan cita-cita kemerdekaan kaum Bumi Putra (bangsa Indonesia), politik pemerintah kolonial Belanda, dan tujuan serta ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda.

No. 2. Perhatikan kesamaannya bagi kepentingan bangsa Indonesia, dan perbedaannya dalam hal asas pendidikannya. No. 3. Kata kuncinya demi kepentingan perang.

Rangkuman:

Pendidikan oleh Kaum Pergerakan Nasional. Faktor intern yang menimbulkan pergerakan kebangsaan (pergerakan nasional) antara lain adalah: 1) Penderitaan dan berbagai kondisi yang merugikan bangsa Indonesia akibat kebijakan pemerintah kolonial Belanda telah menimbulkan rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang dijajah sehingga muncul rasa kebangsaan/nasionalisme. 2) Kebesaran masa lampau bangsa kita juga memperkuat rasa harga diri sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. 3) Kaum terpelajar di kalangan bangsa kita terdorong untuk berperan menjadi motor pergerakan. 4) Bahasa melayu yang merupakan bahasa kesatuan makin menyadarkan bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa. 5) Karena mayoritas bangsa Indonesia memeluk agama Islam, maka timbul persepsi bahwa Belanda adalah Kafir.

Sejak Kebangkitan Nasional (1908) sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik dalam jalur politik, ekonomi, sosial-budaya, dan khususnya melalui jalur *pendidikan*. Sifat perjuangan bangsa kita saat itu tidak lagi

hanya menitik beratkan pada perjuangan bidang fisik. Mengingat ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang tidak memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu, dan merdeka, maka kaum pergerakan memasukan pendidikan ke dalam program perjuangannya. Hampir setiap organisasi pergerakan nasional mencantumkan dan melaksanakan pendidikan dalam anggaran dasar dan/atau dalam program kerjanya.

Karakteristik pendidikan kaum pergerakan adalah: (1) bersifat nasionalistik dan sangat anti kolonialis, (2) berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri, dan (3) pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sebagai perwujudan harga diri yang tinggi dan kebhinekaan masyarakat Indonesia serta pentingnya pengembangan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pendidikan Zaman Pendudukan Militerisme Jepang. Sesuai kondisi politik saat ini, tujuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Pendudukan Jepang diarahkan demi kepentingan memenangkan Perang Asia Timur Raya bagi Jepang. Karakteristik pendidikannya adalah: 1) hilangnya *sistem dualisme* pendidikan, 2) kesempatan untuk sekolah terbuka bagi setiap lapisan masyarakat, 3) susunan jenjang sekolah menjadi SR 6 Th., SM 3 Th., SMT 3 Th., dan PT., 4) hilangnya *sistem konkordansi* 5) bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dijadikan bahasa pengantar, sedangkan bahasa Belanda dilarang sebagai bahasa pengantar di sekolah.

Tes formatif 2

Jawablah semua soal di bawah ini:

1. Selain berjuang melalui politik praktis, dsb. mengapa Kaum Pergerakan Nasional berjuang pula melalui jalur pendidikan?
2. Kemukakan tiga karakteristik pendidikan yang diselenggarakan oleh Kaum Pergerakan Nasional pada zaman Kolonial Belanda!
3. Kemukakan latar belakang lahirnya Muhammadiyah!
4. Dasar pendidikan Perguruan Taman Siswa adalah Panca Dharma. Tuliskan kelima dharma dari Panca Dharma tersebut, dan dharma apa saja yang terutama melandasi semboyan "*tutwuri handayani*" atau "*Among Methode*".
5. Kemukakan karakteristik pendidikan pada zaman pendudukan militerisme Jepang!

Balikan dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat pada bagian akhir BBM ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{5} \times 100 \%$$

Kriteria Tingkat Penguasaan:

90 % - 100 % = Baik Sekali.

80 % - 89 % = Baik.

70 % - 79 % = Cukup.

< 69 % = Kurang.

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari Kegiatan Belajar selanjutnya. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Kegiatan Belajar 3

PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE TAHUN 1945-1969 DAN MASA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (PJP) Ke I: 1969-1993

Kegiatan belajar ini menyajikan sejarah pendidikan Indonesia pada periode tahun 1945-1969 dan pada masa PJP I. Kajian dalam BBM ini meliputi latar belakang politik dan implikasinya terhadap pendidikan. Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar ini Anda akan dapat menjelaskan perkembangan kebijakan dan praktek pendidikan yang diselenggarakan pada periode tahun 1945-1969 dan pada masa PJP I.

1. Pendidikan pada Periode Tahun 1945-1969

a. Zaman Revolusi Fisik Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara. Sejak saat ini jenjang dan jenis pendidikan mulai disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Contoh: Sekolah Menengah zaman Jepang (*Skoto Cu Dakko dan Coto Cu Gakko*) diubah menjadi SMTP dan SMTA.

Bersamaan dengan berjalannya revolusi fisik, pemerintah mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai amanat UUD 1945. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan “Instruksi Umum” agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan *patriotisme*. Selanjutnya, diawali dengan Kongres Pendidikan, Menteri PP dan K membentuk Komisi Pendidikan dan Komisi ini membentuk Panitia Perancang Undang-Undang (RUU) mengenai pendidikan dan pengajaran. Karena terganggu dengan pecahnya perang kolonial kedua, pembahasan RUU di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) terhenti dan baru dapat dilaksanakan kembali pada tanggal 29 Oktober 1949. Tanggal 5 April 1950 RUU tersebut diundangkan sebagai UU RI No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. UU RI No. 4 Tahun 1950 ini kemudian diterima oleh DPR pada tanggal 27 Januari 1954, kemudian disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954 dan diundangkan tanggal 18 Maret 1954 sebagai UU No. 12 Tahun 1954 (H.A.R. Tilaar, 1995).

b. Peletakan Dasar Pendidikan Nasional.

Pada tgl. 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Namun setelah Konferensi Meja Bundar, tahun 1949 terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang memberlakukan UUD RIS. Pada saat RIS kembali ke negara kesatuan RI, UUD RIS diganti dengan UUD Sementara RI atau UU No. 7 Tahun 1950. Setelah Pemilu tahun 1955, karena Konstituante gagal menyusun UUD maka tgl. 5 Juli 1959 keluarlah Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia kembali kepada UUD 1945.

Sekalipun terjadi pergantian bentuk dan konstitusi negara sebagaimana diuraikan di atas, tetapi pendidikan nasional Indonesia tetap dilaksanakan sesuai jiwa UUD 1945, dan bahwa UU RI No. 4 Tahun 1950 *de facto* digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan untuk seluruh daerah Negara Kesatuan RI. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI tgl. 19 Mei 1950, serta sebagaimana dinyatakan dalam Pengumuman Bersama Menteri PP dan K RIS dan RI tgl. 30 Juni 1950. Selanjutnya UU pernyataan berlakunya UU tersebut di atas (RUU) diajukan kepada DPR. Pada tgl. 27 Juni 1954 DPR menerima RUU tersebut, kemudian disahkan oleh pemerintah pada tgl. 12 Maret 1954, dan diberlakukan pada tgl. 18 Maret 1954 sebagai UU RI No. 12 Tahun 1954. Di dalam Pasal 3 UU ini termaktub bahwa *“Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”*. Adapun Pasal 4 menyatakan: *“Pendidikan dan pengajaran berdasar asas-asas yang termaktub dalam “Panca Sila” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia”*.

c. Demokrasi Pendidikan

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UURI No. 4 Tahun 1950, meskipun menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu Kewajiban Belajar Sekolah Dasar bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. Rencana kewajiban belajar sekolah dasar ini direncanakan selama 10 tahun (1950-1960). Pelaksanaan program ini didukung dengan PP No. 65 Tahun 1951.

Karena pelaksanaan kewajiban belajar ini menghadapi masalah kekurangan guru dan jumlah sekolah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan No. 5033/F tgl. 5 Juli 1950 didirikanlah Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar (KPKPKB). Pada tahun 1952 Jumlah KPKB (Kursus Pengantar Kewajiban Belajar) sebagai embrio SD atau SD Kecil telah mencapai 3.372 dengan jumlah siswa sekitar setengah juta orang. Pada saat ini demokratisasi pendidikan (kewajiban belajar) tampak sudah mulai dilaksanakan. Selanjutnya KPKPKB ditingkatkan menjadi SGB dan SGA, selain itu . didirikan pula kursus-kursus persamaan SGB dan SGA (H.A.R. Tilaar, 1995).

d. Lahirnya LPTK pada Tingkat Universitas

Apabila dalam pelaksanaan kewajiban belajar SD telah menimbulkan KPKPKB, SGB, dan SGA, maka untuk suplai guru sekolah menengah dilaksanakan melalui PGSLP serta Kursus B I dan Kursus B II untuk guru sekolah Lanjutan Atas. Selain lembaga-lembaga tersebut beberapa lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan antara lain: APD (Akademi Pendidikan Jasmani), ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia), Sekolah Musik Indonesia, Konservatori Karawitan, dan Fakultas Pedagogik Universitas Gajah Mada.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka atas dorongan Prof. Moh. Yamin pada tahun 1954 didirikanlah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di empat tempat yaitu di Batu Sangkar, Bandung, Malang dan Tondano. Atas dasar konferensi antar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) negeri seluruh Indonesia di Malang tanggal 21 s.d. 25 Agustus 1960, maka berbagai lembaga pendidikan tenaga guru (PGSLP, Kursus BI, BII dan PTPG) diintegrasikan ke dalam FKIP pada Universitas. Selanjutnya pada tahun 1960-an didirikanlah IKIP yang berdiri sendiri sebagai perpindahan dari PTPG sesuai dengan UU PT No. 22 Tahun 1961, sekalipun demikian di beberapa Universitas FKIP tetap berdiri.

e. Lahirnya Perguruan Tinggi

Antara tahun 1949-1961 pemerintah Indonesia telah mendirikan berbagai PT antara lain: Universitas Gajah Mada (20 November 1949), Universitas Indonesia (1950), Universitas Airlangga (1954). Universitas Hasanuddin, PTPG yang kemudian menjadi IKIP (1954-1961), Universitas Andalas (1956) dan Universitas Sumatera Utara di Medan.

Pada tanggal 4 Desember 1961 lahir UU No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Pokok-pokok yang menonjol dalam UU ini yang sampai sekarang masih dipertahankan adalah prinsip Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

f. Era Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969

Pidato Presiden RI tgl. 17 Agustus 1959 sebagai penjelasan resmi tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikenal sebagai *Manifesto Politik (Manipol)*. Melalui TAP MPRS-RI No. I/MPRS/1960 Manifesto Politik tersebut ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan berdasarkan TAP tersebut dikeluarkan pula TAP MPRS-RI No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969. Di dalam TAP tersebut antara lain dikatakan bahwa pembangunan semesta berencana tahap pertama ini merupakan pembangunan dalam masa peralihan menuju masyarakat adil dan makmur, demikian pula pembangunan tersebut sifatnya menyeluruh. Dasar-dasar pembangunan tersebut ialah Pancasila dan Manipol serta untuk mengembangkan kepribadian Indonesia. Dalam era ini Manipol dijadikan doktrin negara, dan dalam perkembangan selanjutnya, intisari Manipol dirangkumkan dengan kependekan USDEK, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol USDEK secara sistematis diindoktrinasikan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk di semua jenjang dan jenis pendidikan.

Dalam TAP-TAP MPRS di atas ada beberapa hal yang menarik perhatian, antara lain bahwa: (1) untuk mengembangkan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia, maka pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing harus ditolak; (2) Pancasila dan Manipol dijadikan mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi; (3) pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa para siswa/mahasiswa *berhak untuk tidak ikut serta*, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya. Rumusan ini jelas merupakan rumusan yang dimasukan oleh golongan politik tertentu. Jelas-jelas rumusan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila (H.A.R. Tilaar, 1995).

Setelah Presiden menyatakan Dekrit 5 Juli 1959, salah satu usaha menyesuaikan pendidikan nasional dengan perkembangan politik pada masa itu, maka atas dasar Instruksi Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 1 tanggal 17 Agustus 1959 di keluarkan apa yang disebut *Sapta Usaha Tama*. Sebagai pelaksanaan instruksi di atas, di dalam Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 2 tanggal 17 Agustus 1961 dirumuskan sebagai berikut: 1) Menegaskan Pancasila dengan Manipol sebagai pelengkapannya, sebagai asas pendidikan nasional. 2) Menetapkan *Pantja Wardhana*. Selain itu diselenggarakan pula apa yang disebut dengan *Hari Krida*.

Dalam rangka menyesuaikan segala usaha untuk mewujudkan Manipol, melalui Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965 pendidikan nasional dipandang sebagai sarana yang maha penting, fungsi pendidikan nasional dipandang sebagai alat revolusi. Pendidikan harus difungsikan atau harus memiliki Lima Dharma Bhakti Pendidikan, yaitu: (1) Membina Manusia Indonesia Baru yang berakhlak tinggi (Moral Pancasila); (2) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam segenap bidang dan tingkatnya (*manpower*); (3) Memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional; (4) Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (5) Menggerakkan dan menyadarkan seluruh kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat dan manusia Indonesia Baru. Selanjutnya dinyatakan bahwa asas pendidikan nasional adalah Pancasila – Manipol USDEK. Dengan demikian ***tujuan pendidikan nasional*** adalah untuk melahirkan warga negara-warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Dalam hal ini, moral pendidikan nasional ialah Pancasila Manipol/USDEK, dan politik pendidikannya adalah Manifesto Politik. Selanjutnya melalui Penetapan Presiden RI No. 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila antara lain dirumuskan kembali mengenai dasar asas pendidikan nasional, tujuan, isi moral, dan politik nasional. Yang menarik dalam rumusan-rumusan tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa tugas pendidikan nasional Indonesia ialah menghimpun kekuatan progresif revolusioner berporoskan *Nasakom*.

Banyak program pembangunan yang telah direncanakan dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama (1961-1969). Rencana proyek pembangunan di bidang pendidikan antara lain berkenaan pengembangan pendidikan tinggi,

diprioritaskannya pengembangan sekolah-sekolah kejuruan, kursus-kursus, dsb. Namun demikian akibat pecahnya pemberontakan G-30-S/PKI, maka rontoklah rencana pembangunan nasional semesta berencana tersebut.

Setelah pemberontakan G. 30 S/PKI dapat ditumpas, terjadi suatu keadaan peralihan masyarakat Indonesia dari *Orde Lama* ke *Orde Baru*. Dalam menegakkan Orde Baru ini terlibat secara aktif golongan intelektual yang dikenal sebagai KAMI dan KAPPI yang menggelorakan Tri Tura. Khususnya dalam bidang pendidikan, pada masa ini prinsip pendidikan Pantja Wardhana kemudian disusul dengan *sistem pendidikan nasional Pancasila*. Hal ini sebagaimana isi Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa *sistem pendidikan haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya ialah membentuk manusia Pancasila sejati. Isi pendidikannya ialah untuk mempertinggi moral, akhlak dan keyakinan agama, mempertinggi keterampilan dan kecerdasan, dan mempertinggi mutu kesehatan fisik manusia*. Hal tersebut diperkuat lagi dengan Tap MPRS RI No. XXXIV/MPRS/1967 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. Selanjutnya, melalui TAP MPR-RI No. V/MPR/1973 tentang Pencabutan produk-produk yang berupa ketetapan-ketetapan MPRS-RI menyatakan tidak berlaku lagi dan mencabut TAP I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, juncto TAP XXXIV/MPRS/67 tentang peninjauan kembali ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN (H.A.R. Tilar, 1995).

2. Pendidikan Pada Masa PJP I

Pelaksanaan Pelita I PJP I dicanangkan mulai 1 April 1969, maka pada tgl. 28-30 April 1969 pemerintah c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar/pemikir pendidikan di Cipayung untuk melakukan konferensi dalam rangka: 1) mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional, dan 2) menyusun suatu prioritas pemecahan dari berbagai masalah tersebut, serta mencari alternatif pemecahannya.

Salah satu hasil konferensi Cipayung itu ialah lahirnya *Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP)* pada tgl. 1 Mei 1969 melalui SK Mendikbud tgl. 26 Mei 1969. Isi

SK tersebut ialah bahwa dalam jangka waktu dua tahun (kemudian diubah menjadi tiga tahun) PPNP harus sudah berhasil menyusun strategi pendidikan nasional. Hasil kerja PPNP dimanfaatkan oleh *Badan Pengembangan Pendidikan* atau **BPP** (Sekarang BALITBANG) Depdikbud yang didirikan melalui Keputusan Presiden No. 84/1969 tgl. 18 Oktober 1969. Hasil kerja PPNP dijadikan dasar perencanaan pendidikan yang lebih baik untuk Pelita II serta telah meletakkan dasar-dasar perencanaan pendidikan untuk Pelita-Pelita selanjutnya. Dengan hasil kerja PPNP inilah pembangunan pendidikan untuk PJP I mulai dimantapkan.

Di dalam rumusan-rumusan kebijakan pokok pembangunan pendidikan selama PJP I terdapat beberapa kebijakan yang terus menerus dikemukakan, yaitu: 1) relevansi pendidikan, 2) pemerataan pendidikan, 3) peningkatan mutu guru atau tenaga kependidikan, 4) mutu pendidikan, dan 5) pendidikan kejuruan. Selain kebijakan pokok tersebut terdapat pula beberapa kebijakan yang perlu mendapat perhatian kita. Pertama, kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam bidang pendidikan. Kedua, pengembangan sistem pendidikan yang efisien dan efektif. Ketiga, dirumuskan dan disyahnkannya UU RI No. 2 Tahun 1989 Tentang “Sistem Pendidikan Nasional” sebagai pengganti UU pendidikan lama yang telah diundangkan sejak tahun 1950.

Tujuan Pendidikan Nasional. Sesuai dengan Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, maka dirumuskan bahwa *Tujuan Pendidikan* adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Selanjutnya dalam UU No. 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kurikulum Pendidikan. Dalam PJP I telah dilakukan tiga kali perubahan kurikulum pendidikan (sekolah), yaitu apa yang dikenal sebagai: Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, dan Kurikulum 1984.

Di dalam kurikulum 1968 dirumuskan bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasila sejati. Isi pendidikannya ialah untuk mempertinggi moral, akhlak dan keyakinan agama, mempertinggi keterampilan dan kecerdasan, dan mempertinggi mutu kesehatan fisik yang kuat. Namun demikian, salah satu ciri utama kurikulum 1968 ini yaitu organisasi kurikulumnya masih berorientasi kepada bahan/mata pelajaran. Dengan mengacu kepada Tap MPR No. II/MPR/1973 tentang GBHN dan dengan menampung berbagai hasil percobaan dalam bidang pendidikan waktu itu, maka kurikulum 1968 diperbaharui dengan kurikulum 1975. Kurikulum 1975 dikembangkan dengan menggunakan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Satuan Pelajaran atau Modul. Ciri utama kurikulum 1975 yaitu organisasi kurikulumnya yang berorientasi kepada tujuan pendidikan, menekankan CBSA dan konsep belajar tuntas. Memang dalam pelaksanaan kurikulum 1975 ini hierarki tujuan pendidikan menjadi jelas, namun demikian kurikulum ini masih bersifat *sentralistik*.

Dengan lahirnya Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, dan berbagai masukan dari Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN), Kurikulum 1975 diperbaharui lagi dengan Kurikulum 1984. Hasil percobaan di Cianjur tentang CBSA lebih memantapkan penyusunan kurikulum tersebut. Pada tingkat SMA, kurikulum ini terdiri atas Program Inti dan Program Pilihan. Juga dibedakan antara Program A untuk jalur akademik dan Program B untuk siswa yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi sehingga memperoleh program-program latihan kekarayaan. Sayang sekali kurikulum ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, seperti program B tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan tenaga maupun biayanya. Selain itu Kurikulum 1984 juga masih bersifat *sentralistik*. Contoh kekurangan tenaga antara lain ditunjukkan oleh hasil penelitian Konsorsium Ilmu Pendidikan bahwa 40% guru SMP dan 33% guru SMA mengajarkan mata pelajaran di luar bidang keahliannya. Demikian pula bahwa kurikulum tersebut tidak didesiminasikan ke LPTK-LPTK sehingga calon-calon guru tidak mengetahui apa sebenarnya isi kurikulum 1984.

Kurikulum Pendidikan Kejuruan. Dalam Pelita I selain penyempurnaan sistem sekolah kejuruan, juga ditingkatkan mutu pendidikannya terutama mutu guru dan laboratoriumnya. Dengan dana pinjaman Bank Dunia diadakan berbagai usaha untuk

meningkatkan pendidikan teknik menengah. Beberapa STM ditingkatkan, juga membangun apa yang disebut Sekolah Teknik Menengah Pembangunan, diadakan bengkel-bengkel latihan pusat yang dapat digunakan beberapa STM termasuk STM swasta. Usaha perbaikan kurikulum terus menerus, baik melalui dana pinjaman dari ADB (*Asian Development Bank*), juga bantuan teknis dari negara-negara sahabat, seperti Australia, Swiss, dan Austria. Memang dengan usaha-usaha itu beberapa STM atau pusat pelatihan tenaga teknik seperti yang ada di Bandung dengan bantuan pemerintah Australia telah dapat menjembatani hubungan antara kurikulum STM atau pusat pelatihan guru teknik dengan dunia industri yang berada di sekitarnya. Namun berbagai usaha tersebut secara keseluruhan belum dapat memenuhi kebutuhan baik mengenai jumlah sekolah kejuruan maupun mutunya. Kurikulum sekolah kejuruan masih terasa masih terlalu banyak mata pelajaran teorinya dan masih terbatas latihan-latihan prakteknya yang justru sangat diperlukan. Peningkatan mutu kurikulum sekolah kejuruan tersebut mengalami kesulitan antara lain juga karena dunia industri kita pada saat itu masih belum menyadari pentingnya kaitan antara sekolah kejuruan dengan sekolah kerja (H.A.R. Tilaar, 1995).

Kurikulum Pendidikan Tinggi (PT). Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi termasuk kurikulumnya juga telah dilaksanakan selama PJP I. Salah satu usahanya adalah dengan mengganti sistem *kontinental* dengan sistem *anglo saxis*, yaitu dengan penerapan sistem kredit semester (Sistem SKS) pada pertengahan tahun 1970-an. Maksudnya adalah untuk meningkatkan efisiensi internal dari PT yang pada saat itu memang sangat rendah. Selain Sistem SKS, juga mata-mata kuliah yang diajarkan dikaji dan disesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dalam rangka inilah dibentuk apa yang disebut konsorsium perguruan tinggi menurut program studi yang disajikan di PT.

Sarana, Prasarana Pendidikan. Perkembangan pendidikan di Indonesia selama PJP I secara kuantitatif merupakan fenomena yang menakjubkan, bukan hanya bagi kita sendiri tetapi juga bagi dunia luar. Secara akumulatif pertumbuhan rata-rata siswa SD selama PJP I sekitar 50% pertahun, SLTP 150%, SLA 220%, dan Perguruan Tinggi (PT) 320%. Angka partisipasi kasar SD dari 64% pada permulaan PJP I menjadi 99,7% pada

akhir PJP I; SMTP dari 16,9% menjadi 66,7%; SMTA dari 8,6% menjadi 45,1%; dan PT dari 1% menjadi 11% (H.A.R. Tilaar, 1995)..

Pertumbuhan jumlah siswa/mahasiswa di berbagai jenjang dan jenis pendidikan tersebut tentu saja disertai pula dengan penambahan prasarana dan sarana pendidikan. Antara lain: gedung-gedung sekolah baru, penambahan ruang belajar, buku-buku pelajaran, pengadaan sarana-sarana pembantu proses belajar-mengajar, pembangunan sarana fisik Perguruan Tinggi, dan pembangunan sarana pendidikan dasar melalui Inpres Pembangunan SD. Prasarana dan sarana pendidikan memang telah banyak dibangun selama PJP I, namun demikian pengadaan prasarana dan sarana pendidikan tersebut ternyata masih belum dapat memenuhi kebutuhan.

Wajib Belajar. Melalui program pembangunan di atas, dan dengan dicanangkannya Wajib Belajar Sekolah Dasar sejak tanggal 2 Mei 1984, maka pada akhir Pelita II kesempatan belajar anak-anak usia 7-12 tahun praktis telah dicapai, walaupun tentunya masih terdapat sejumlah anak-anak yang hidup terpencil, anak-anak luar biasa, maupun putus sekolah yang masih harus dituntaskan di dalam pembangunan selanjutnya (pada tahun 1988/1989 atau akhir Pelita IV angka partisipasi SD telah mencapai 99,6% dari jumlah anak usia 7-12 tahun yaitu 30.182.900 anak). Wajib Belajar SD Enam Tahun pada Pelita V telah diperluas dengan perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Sebab itulah UNESCO pada tahun 1994 menganugerahkan *Bintang Aviciena* kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pengakuan peranan pemerintah Indonesia dalam memajukan pendidikan rakyat (H.A.R. Tilaar, 1995).

Tenaga Kependidikan dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Berkenaan dengan hal ini dalam PJP I antara lain terdapat dua masalah pokok, yaitu: 1) kekurangan tenaga pengajar yang berwenang pada semua jenis dan tingkat pendidikan, dan 2) masalah peningkatan mutu Tenaga Kependidikan dan LPTK.

1) Kekurangan tenaga pengajar yang berwenang pada semua jenis dan tingkat pendidikan.

Pada tahun 1989/1990 untuk SD terdapat kekurangan tenaga hampir 600.000 orang. Ditambah lagi dengan kulaifikasi guru SD banyak yang belum memenuhi persyaratan. Untuk SLTP dan SLTA masalahnya berlainan, walaupun secara makro

terdapat kelebihan guru, tetapi dalam kenyataannya terdapat kekurangan guru yang parah karena memusatnya para guru di kota-kota. Selain itu banyak mata pelajaran yang tenaga gurunya tidak mencukupi. Yang sangat kekurangan adalah guru-guru IPA dan Matematika. Sekitar 40% guru matematika di SMP sebenarnya berlatar belakang sebagai guru agama, sosiologi, antropologi dan ilmu sosial lainnya. Sekitar 30% guru SMA mengajar mata pelajaran yang bukan kemampuan/keahliannya. Mengenai ijazah tertinggi yang dimiliki para guru SMP Negeri: 8,3% dari 204.125 orang guru SMP Negeri belum lulus SLTA, separohnya memiliki ijazah PGSLP atau D1, 17,1% berijazah PGSLP atau D2, dan hanya 24,2 % berijazah Sarjana Muda atau S1. Selanjutnya di SMA Negeri dan Swasta terdapat 4,5% guru belum tamat SLTA, 3,6% berijazah PGSLP atau D1, 58,4% berijazah PGSLA atau D3, dan sisanya 33,5% berijazah sarjana muda atau S1.

Pada tahun 1989 dari sekitar 11 ribu dosen pada 30 IKIP dan FIP Negeri baru 3% berkualifikasi S3, 10% S2 dan 87% berkualifikasi S1. Keadaan ini tentu saja mempengaruhi usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Masalah pemenuhan kekurangan tenaga kependidikan yang berwenang terhambat bukan hanya karena penyebaran yang tidak merata tetapi juga karena masalah dana yang tidak mencukupi.

2) Masalah peningkatan mutu Tenaga Kependidikan dan LPTK.

Dalam PJP I telah diambil keputusan untuk meningkatkan kualifikasi guru SD dengan Diploma I dan II, guru SMP dengan D III dan untuk SMA semakin lama semakin dipegang oleh lulusan S1. Berkenaan dengan hal di atas, telah dilakukan pula pembaharuan dalam bentuk likuidasi SPG dan SGO menjadi Program DII Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk PT telah didirikan berbagai Program Pascasarjana (S2, S3) dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu para dosen PT. Bea siswa dari dalam dan luar negeri telah lama dilaksanakan, demikian pula telah didirikan beberapa Pusat Antar Universitas (PAU atau *inter-university center*). Selain itu untuk meningkatkan ilmu pendidikan telah didirikan Konsorsium Ilmu Pendidikan (H.A.R. Tilaar, 1995).

Pendidikan Kejuruan, Pelatihan dan Ketenagakerjaan. Konsep keterkaitan antara pendidikan nasional dan dunia kerja yang telah dirintis sejak Pelita I dalam pelaksanaannya pada Pelita-Pelita berikutnya mengalami berbagai hambatan. Setiap sektor termasuk sektor pendidikan dan tenaga kerja masing-masing berjalan sendiri-

sendiri. Akibatnya terjadilah ketidakserasian antara output sistem pendidikan nasional dengan kebutuhan tenaga kerja (muncul masalah *relevansi* atau masalah *link and match*). Sistem pendidikan telah menghasilkan tenaga terdidik tetapi tidak terampil, sehingga pengangguran makin lama semakin besar jumlahnya.

Pada PJP I kualitas manusia Indonesia memang meningkat, termasuk pula pendidikannya. Contoh: antara tahun 1971-1990 penduduk yang tidak berpendidikan berkurang dari 42,5% menjadi 18,9%. Pada Tahun 1971 penduduk yang tamat SD baru 21,6%, sedangkan tahun 1990 menjadi 30,1%. Begitu pula untuk tingkat SLTP dan SLTA naik lebih dari 300% dan untuk tingkat PT menjadi hampir lima kali lipat. Naiknya tingkat pendidikan manusia Indonesia berpengaruh terhadap latar belakang pendidikan tenaga kerja kita. Makin tinggi latar belakang pendidikan tenaga kerja diharapkan akan semakin tinggi pula produktivitasnya. Namun demikian, pada tahun 1990 tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia adalah terendah di ASEAN. Selain itu apabila pada tahun 1971 terdapat 840.000 orang penganggur, maka pada tahun 1990 meningkat tiga kali lipat yaitu hampir mencapai 2,5 juta orang penganggur. Memang tercatat pula bahwa jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat, yaitu jika pada tahun 1971 baru sekitar 40 juta, maka pada tahun 1990 menjadi 72 juta.

Keadaan di atas menunjukkan adanya masalah relevansi dan atau kurangnya keterkaitan dan kesepadanan antara output pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Contohnya: terdapat kelebihan lulusan SLTA kejuruan, tetapi sebenarnya di lapangan terdapat kekurangan yang besar mengenai tenaga-tenaga tamatan SLTA Kejuruan Teknik. Terdapat pula masalah koordinasi mengenai pendidikan kejuruan, pelatihan dan ketenagakerjaan ini, yaitu simpang siurnya mengenai tanggung jawab pembinaan pendidikan menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 (mengenai tugas Menteri Pendidikan, Menteri Tenaga Kerja, dan Ketua LAN) dengan PP No. 73 Tahun 1991 yang mengacu pada UU RI No. 2 Tahun 1989 yang mengatur tentang Pendidikan Luar Sekolah yang juga mengatur tugas PLS yang mencakup berbagai jenis pelatihan (kursus). Selain hal di atas, masih dirasakan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat (industri, dsb) dalam rangka pendidikan dan pelatihan (H.A.R. Tilaar, 1995).

Pendidikan Tinggi. Selama PJP I pemerintah telah melakukan upaya peningkatan *pemerataan pendidikan tinggi*, yaitu melalui pembangunan sarana fisik PTN-PTN serta sarana penunjang lainnya dengan menggunakan “strategi bertahap bergilir”. Dalam peningkatan pemerataan PT ini partisipasi PTS begitu besar. Tercatat data bahwa pada tahun 1993/1994 jumlah PTN hanya 51, sedangkan PTS berjumlah 1035. Upaya-upaya itu telah memperbesar angka partisipasi pendidikan tinggi. Jika pada tahun 1968 tingkat partisipasi pendidikan tinggi hanya 1,6% (156.000 orang), maka pada akhir PJP I menjadi 11% (2.491.100 orang).

Peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi memang cukup menggembirakan, sekalipun jika dibandingkan dengan di negara lain masih jauh tertinggal. Namun demikian relevansi dan mutu pendidikan tinggi masih perlu terus ditingkatkan. Contoh: di satu pihak terdapat kelebihan produksi sarjana, di pihak lain terdapat kekurangan tenaga-tenaga sarjana dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini berkaitan dengan masalah kurikulum PT tersebut. Komposisi jenis-jenis program studi yang ada menunjukkan bahwa program studi ilmu sosial dan ilmu pendidikan/keguruan lebih banyak dibanding dengan program studi lainnya. Pengangguran sarjana menunjukkan lebih besar pada kedua jenis program studi tersebut.

Mutu pendidikan tinggi kita memang bervariasi mulai dari mutu yang paling tinggi sampai dengan yang sangat diragukan. Hal ini ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: mutu dosennya yang kebanyakan masih berkualifikasi S1, belum cukup tersedianya sarana penunjang seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, serta biaya operasional yang belum memadai. Selain itu juga kualitas raw input ke PT yang berlatarbelakang NEM antara 4-6 (H.A.R. Tilaar, 1995)..

Inovasi Pendidikan. Selama PJP I dan sudah sejak Pelita I keinginan untuk melakukan inovasi pendidikan sangat besar. Bahkan sejak sebelum Pelita I dimulai telah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan identifikasi masalah-masalah pendidikan agar dapat dilakukan usaha-usaha peningkatan sistem dan peningkatan mutu pendidikan nasional. Selain berkenaan dengan tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, sarana/prasarana pendidikan dan wajib belajar, pelaksanaan beberapa inovasi pendidikan selama PJP I yaitu: Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), Proyek Pamong,

Proyek CBSA, STEPPES, COPLANER, dan *Primary Education Quality Improvement Project (PEQIP)*. Sayang sekali berbagai inovasi pendidikan yang telah dilaksanakan banyak menghadapi kemandegan dan tidak berkelanjutan (HAR Tilaar, 1995).

Pembiayaan. Sumber dana pembangunan pendidikan pada PJP I berasal dari dana rupiah dan dana yang diperoleh dari kerja sama luar negeri. Di dalam pembiayaan pendidikan terdapat berbagai sumber yaitu: 1) Pemerintah yang dapat berupa biaya rutin, biaya pembangunan, biaya INPRES SD, dan subsidi batuan pembangunan pendidikan (SBPP). 2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). 3) Sumbangan untuk badan pembantu pembinaan pendidikan (BP3).

Jumlah dana pembangunan untuk sektor pendidikan pada Pelita I sebesar 83,8 milyar rupiah (6,8% dari jumlah dana pembangunan), adapun pada Pelita V meningkat menjadi 9 trilyun rupiah (11,4% dari jumlah dana pembangunan). Jadi jumlah dana pembangunan sektor pendidikan selama PJP I mencapai 20 trilyun rupiah. Dana sektor pendidikan ini belum lagi ditambah dari dana rutin, SPP, dll.

Kualitas Pendidikan. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu selama PJP I telah banyak upaya pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional. HAR Tilaar (1995) menunjukkan kualitas pendidikan pada PJP I antara lain dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Dana Pendidikan (Pendidikan Dasar): Belum memadainya dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada tahun 1991 unit cost untuk siswa SD tidak lebih dari 5 US \$, sedangkan negara maju menyediakan 105,5 US \$.
- 2) Kelulusan SD: Persentase jumlah siswa yang menamatkan SD pada tahun 1989 sekitar 70%, sedangkan di negara maju mencapai 91%. Data ini menunjukkan pula bahwa SD kita pada saat itu mengalami ketidak efisienan dengan data rasio input-output sebesar 70%, sehingga rata-rata waktu yang diperlukan untuk menamatkan SD adalah 8,5 tahun.
- 3) Prestasi membaca komprehensif juga dinilai sangat kurang dibanding dengan di negara maju.
- 4) Daya Serap terhadap isi kurikulum: Rata-rata hasil EBTANAS Murni siswa SMA pada tahun 1987-1990 menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan kita.

Misalnya untuk mata pelajaran PMP dan Bahasa Indonesia rata-ratanya 6; sedangkan B. Inggris, Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia antara 4-5. Artinya daya serap lulusan SMA kurang dari 50% dari apa yang ditentukan dalam Kurikulum 1984.

Selain hal di atas, kita juga mengetahui bahwa jumlah pengangguran semakin meningkat. Apabila tahun 1971 tercatat 840.000 orang, maka pada tahun 1990 menjadi hampir 2,5 juta orang. Pengangguran itu pun adalah banyak dari lulusan sekolah dan perguruan tinggi. Di satu pihak terdapat kelebihan lulusan SLTA dan PT, di lain pihak terdapat kekurangan tenaga-tenaga tertentu dari lulusan SLTA dan PT tersebut.

Latihan:

Dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia kita mengenal pembangunan pendidikan pada era Orde Lama (1961-1969) dan era pembangunan Pendidikan pada era Orde Baru (1969-1993). Coba Anda bandingkan dasar dan tujuan pendidikan dari kedua era atau orde pembangunan tersebut !

Petunjuk Jawaban Latihan:

Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, Anda perlu mengingat kembali Makna dari Dekrit Presiden 5 juli 1959, Manipol USDEK, dan mengenai Dasar/asas serta tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965 dan Penetapan Presiden RI No. 19 Tahun 1965. Selain itu Anda perlu pula memperhatikan makna Orde Baru, Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966, dan UU RI No. 2 Tahun 1989.

Rangkuman:

Periode 1945-1969. Pada tgl. 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Sejak saat itu jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Sekalipun pada tahun 1949 terjadi perubahan dasar negara yaitu dengan UUD RIS, tetapi pendidikan nasional tetap dilaksanakan sesuai amanat UUD 1945. Sejak tahun 1950 bangsa Indonesia telah mempunyai UU RI No. 4

Tahun 1950 tentang “Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah” *yuncto* UU RI No. 12 Tahun 1954. Di dalam Pasal 3 UU ini termaktub bahwa “Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Adapun Pasal 4 menyatakan: “Pendidikan dan pengajaran berdasar asas-asas yang termaktub dalam “Panca Sila” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia”.

Pada Tahun 1950-1960 telah dirancang dan dilaksanakan wajib belajar SD, untuk mengatasi kekurangan guru didirikan Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar (KPKPKB). KPKPKB selanjutnya ditingkatkan menjadi SGB dan SGA. Adapun untuk guru sekolah menengah didirikan PGSLP dan APD. Tahun 1954 didirikan PTPG yang diubah menjadi FKIP dan akhirnya menjadi IKIP. Selain LPTK, sejak tahun 1949-1961 pemerintah juga telah mendirikan beberapa perguruan tinggi (universitas) dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1961 tentang “Perguruan Tinggi”.

Pada era Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama (1961-1969) sekalipun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan bahwa Bangsa dan Negara Kesatuan RI kembali ke UUD 1945, tetapi karena dominasi politik tertentu maka dasar atau asas pendidikan nasional diubah menjadi *Pancasila dan Manipol USDEK*. Pada era ini tujuan pendidikannya adalah untuk melahirkan warga-warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Tugas pendidikan adalah menghimpun kekuatan progresif revolusioner berporoskan *Nasakom*. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka ditetapkan apa yang disebut Sapta Usaha Tama, Pantja Wardhana, dan Hari Krida. Berbagai program pembangunan pada era ini akhirnya rontok akibat terjadinya Pemberontakan G-30 S/PKI pada tahun 1965 dan lahirlah era baru yang dikenal dengan Orde Baru.

Era PJP I (1969-1993). Sejak zaman Orde Baru dan dalam era PJP I dasar pendidikan dikembalikan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan Isi UUD 1945, yang kemudian di dalam UU No. 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Sejak awal Pelita I PJP I telah dilakukan identifikasi masalah-masalah pendidikan nasional, selanjutnya pembangunan pendidikan dilakukan secara bersinambungan pada setiap Pelita. Selama PJP I telah dilakukan tiga kali pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu kurikulum 1968, 1975 dan 1984; penambahan dan perbaikan sarana maupun prasarana pendidikan; Inpres SD; Upaya peningkatan jumlah dan mutu tenaga kependidikan; serta dilakukan berbagai inovasi pendidikan lainnya demi meningkatkan partisipasi, relevansi, efisiensi, efektivitas dan mutu pendidikan nasional. Untuk itu, pembangunan pendidikan dibiayai baik dengan menggunakan dana rupiah maupun dana hasil kerjasama luar negeri. Memang banyak hasil pembangunan pendidikan selama PJP I yang telah di raih, namun demikian permasalahan pendidikan masih tetap belum terpecahkan secara keseluruhan dan masih harus terus diupayakan melalui pembangunan pendidikan pada PJP selanjutnya.

Test Formatif 3

Jawablah semua soal di bawah ini:

1. Kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pendidikan apakah yang telah diambil pemerintah setelah proklamasi 17 Agustus 1945 hingga menjelang era Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama(1961) ?
2. Sebagai koreksi terhadap kebijakan dan praktek pendidikan era Orde Lama, Orde Baru menetapkan kembali Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pendidikan nasional. Apakah asas (dasar) pendidikan nasional pada era Orde Lama ?
3. Selama PJP I telah dilakukan tiga kali perubahan kurikulum sekolah, kemukakan ketiga kurikulum yang dimaksud !
4. Hasil pembangunan pendidikan selama PJP I dalam hubungannya dengan ketenagakerjaan di Indonesia masih memunculkan masalah relevansi. Jelaskan !

Balikan dan Tindak Lanjut:

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat pada bagian akhir BBM ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{4} \times 100 \%$$

Kriteria Tingkat Penguasaan:

- 90 % - 100 % = Baik Sekali.
 80 % - 89 % = Baik.
 70 % - 79 % = Cukup.
 < 69 % = Kurang.

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari BBM 6. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Kunci Jawaban**Tes Formatif 1:**

1. Tujuan Pendidikan pada zaman Purba adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat dan nilai-nilai religi.
2. Perubahan atau perkembangan yang terjadi antara lain: a) dasar atau nilai acuan pendidikan adalah ajaran Hindu/Budha; b) berdirinya lembaga pendidikan yang dikenal sebagai *pesantren atau paguron*; dan c) berkembangnya cara-cara pendidikan *sistem guru-kula*.
3. Pada zaman Kerajaan Islam pendidikan bersifat demokratis, maksudnya bahwa kesempatan pendidikan diberikan bagi semua orang. Dasarnya adalah ajaran Islam yang tidak mengenal kasta-kasta, serta hukum wajibnya setiap orang mencari ilmu.
4. Tujuan pendidikan pada zaman Portugis/Spainjol utamanya adalah demi penyebaran agaman Katholik.
5. Dasar sosial budayanya adalah politik kolonialisme, diberlakukannya stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa, dan kepentingan monopoli ekonomi. Tujuan pendidikannya untuk menghasilkan tenaga kerja murah, dan untuk melanggengkan penjajahan.
 Bagi Bumi Putera, dualisme penyelenggaraan pendidikan sangat merugikan, sebab pendidikan tersebut bukan untuk mencerdaskan kehidupan kaum Bumi Putera serta adanya diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan, dan menimbulkan perpecahan di kalangan kaum Bumi Putera. Adapun sistem konkordansi di satu pihak menguntungkan karena penyelenggaraan pendidikan menjadi relatif sama dengan di negeri Belanda, tetapi dipihak lain merugikan karena dengan sistem konkordansi jiwa kaum Bumi Putera diupayakan agar menjadi asing dengan budaya dan kebangsaannya sendiri.

Test Formatif 2:

1. Sebab kaum pergerakan nasional menyadari bahwa pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda tidak memungkinkan bangsa Indonesia menjadi cerdas, bebas, bersatu dan merdeka. Tujuan dan ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda diarahkan hanya untuk menghasilkan tenaga kerja murah dan demi melanggengkan penjajahan.
2. Karakteristik pendidikan kaum pergerakan adalah: (1) bersifat nasionalistik dan sangat anti kolonialis, (2) berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri, dan (3) pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sebagai perwujudan harga diri yang tinggi dan kebhinekaan masyarakat Indonesia serta pentingnya pengembangan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia.
3. Latar Belakang lahirnya Muhammadiyah adalah atas dasar kesadaran bahwa: pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, melainkan dilaksanakan hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda; melihat gejala nyata bahwa pemerintah Belanda (*missionaris*) berusaha memperluas pendidikan dan pengajaran Kristen (kritisasi); dan dengan didorong oleh cita-cita ingin mengadakan pembaharuan dalam cara berfikir dan beramal masyarakat menurut tuntutan agama Islam yaitu Qur'an dan Hadits sebagaimana diajarkan oleh Rosulullah, maka pada tanggal 18 November 1912 K. H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta.
4. Panca Dharma adalah dasar pendidikan Taman Siswa, yaitu: kebebasan/ kemerdekaan, kebudayaan, kodrat alam, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Semboyan Tutwuri Handayani atau Among Methode terutama dilandasi dharma kebebasan/kemerdekaan dan kodrat alam.
5. Karakteristik pendidikannya adalah: 1) hilangnya *sistem dualisme* pendidikan, 2) kesempatan untuk sekolah terbuka bagi setiap lapisan masyarakat, 3) susunan jenjang sekolah menjadi SR 6 Th., SM 3 Th., SMT 3 Th., dan PT., 4) hilangnya *sistem konkordansi* 5) bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dijadikan bahasa pengantar, sedangkan bahasa Belanda dilarang sebagai bahasa pengantar di sekolah.

Test Formatif 3:

1. Kebijakan dan praktek pendidikan yang telah diambil pemerintah saat itu antara lain: 1) mengeluarkan "instruksi Umum" agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme; 2) membentuk Panitia Perancang UU mengenai Pendidikan dan Pengajaran yang pada akhirnya melahirkan UU RI No. 4 Tahun 1950 Tentang "Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah" yuncto UU RI No. 12 Tahun 1954; 3) melaksanakan Wajar SD bagi anak-anak usia 8 tahun; 4) melaksanakan KPKPKB, SGB, SGA; 5) Selanjutnya mendirikan Kursus PGSLP, Kursus BI dan BII; 5) mendirikan PTPG, diubah menjadi FKIP dan akhirnya menjadi IKIP. 6) mendirikan beberapa Universitas, dan 7) melahirkan UU No. 22 Tahun 1961 tentang "Perguruan Tinggi".
2. Dasar pendidikan nasional pada masa Orde Lama adalah Pancasila dan Manipol USDEK.

3. Kurikulum 1968, kurikulum 1975, dan kurikulum 1984.
4. Hasil pembangunan pendidikan dalam hubungannya dengan ketenagakerjaan masih memunculkan masalah relevansi: Secara kuantitas lulusan sekolah memang dipandang cukup banyak, tetapi mereka belum terampil dan kemampuan mereka tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Dengan demikian dibanding dengan pada awal PJP I, maka pada akhir PJP I jumlah pengangguran semakin meningkat.

Daftar Pustaka

- Ibrahim, Thalib (Penyadur), (1978), *Pendidikan Mohd. Sjafei INS Kayu Tanam*, Mahabudi, Jakarta.
- Djumhur, I dan Danasuparta, (1976), *Sejarah Pendidikan*, CV. Ilmu, Bandung.
- Majelis Luhur Persatuan Taman siswa, (1977), *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan*, Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta.
- Muchtar, O., (1976), *Pendidikan Nasional Indonesia, Pengertian dan sejarah Perkembangan*, Balai Penelitian Pendidikan IKIP Bandung.
- Poerbakawatja, S., (1970), *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soejono, Ag., (1979), *Aliran-Aliran Baru dalam Pendidikan; Bagian ke-2*, CV. Ilmu, Bandung.
- Suhendi, Idit, (1997), *Dasar-Dasar Historis dan Sosiologis Pendidikan*, dalam Dasar-Dasar Kependidikan, IKIP Bandung.
- Tilaar, HAR., (1995), *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995, Suatu Analisis Kebijakan*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Tirtarahardja, U. dan La Sula (1995), *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Glossarium

- **CBSA**, Cara Belajar Siswa aktif.
- **Hari Krida**, hari untuk kegiatan-kegiatan lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga dan permainan pada tiap hari Sabtu.
- **KAMI**, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia.
- **KAPPI**, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia.
- **Neolitik**, fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan yang terbuat dari batu yang telah diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar.
- **NASAKOM**, Nasionalis, Agama, dan Komunis.
- **Orde Baru**, Orde yang bertekad mengoreksi dan mengadakan introspeksi secara mendasar dan menyeluruh atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang telah disalaharahkan oleh Orde Lama; Tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara kita, yang diletakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

- **Paleolitik**, fase atau tingkat kebudayaan zaman purba yang berlangsung kurang lebih dari 750.000 tahun s.d. 15.000 tahun yang lalu, ditandai dengan pemakaian alat-alat serpih, zaman batu tua.
- **Pantja Wardhana**, Sistem pendidikan yang meliputi: 1) perkembangan kecerdasan; 2) perkembangan moral nasional, 3) perkembangan artistik emosional; 4) pengembangan skill; 5) perkembangan fisik (kesehatan/jasmani).
- **Perguruan**, Lembaga pendidikan dimana guru dan para murid hidup bersama di padepokan, dan para murid berguru kepada para cerdik cendekia (guru). Perguruan ini lambat laun dikenal sebagai pesantren yaitu tempat para santri (catrik) berguru.
- **Sapta Usaha Tama**, Usaha-usaha meliputi: 1) Penertiban aparatur dan usaha Kementrian PP dan K; 2) Menggiatkan kesenian dan olahraga; 3) Mengharuskan usaha halaman; 4) Mengharuskan penabungan; 5) Mewajibkan usaha-usaha koperasi; 6) Mengadakan kelas masyarakat; 7) Membentuk regu kerja di kalangan SLA dan Universitas.
- **Stratifikasi Sosial**, pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya.
- **Tri Tura**, Tiga tuntutan rakyat, yaitu: 1) kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen, 2) menghapuskan sisa-sisa PKI, dan 3) menurunkan harga.
